



Demokrasi Dalam Krisis

Bagaimana Sistem Politik Islam
Memastikan Good Governance

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demokrasi dalam Krisis
Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance
Terjemah Bahasa Inggris ke Indonesia : Annas I. Wibowo

Kata Pengantar
Pendahuluan

Bab 1 Mengapa Teori Demokrasi Tidak Bisa Dipertahankan

Bagian 1 Bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak kunci dapat dengan mudah ditahan.

Bagaimana Demokrasi dapat sama dengan kekuasaan geng

Bagian 2 Mayoritas tidak berarti menjadi hukum-hukum yang baik

Bagian 3 Pemilihan periodik mendukung mereka yang punya uang dan merugikan pembuatan keputusan jangka panjang yang sulit. Politik menjadi berkatat sekitar melayani elit bukannya publik

Bab 2 - Studi Kasus

Amerika Serikat

Inggris

India

Afghanistan

Bab 3 Tanya Jawab Mengenai Sistem Khilafah Islam

Kesimpulan

html:

Demokrasi Berada Dalam Krisis - Sistem Krisis Demokrasi Sekular

Demokrasi Menghasilkan Krisis - Demokrasi Sekular Sistem Krisis

Teori Demokrasi Tidak Bisa Dipertahankan – Krisis Sistem Demokrasi Sekular

Kecacatan Hukum Demokrasi - Demokrasi Sistem Hukum Cacat

Politik Demokrasi Melayani Elit Saja - Frekuensi Pemilihan umum Pemilu

Periodik Demokrasi

Kerusakan Kejahatan Amerika Serikat - Daftar Kebobrokan Kebusukan AS

Kehinaan Amerika Serikat

Keburukan Kejahatan Inggris - Daftar Kebusukan Kebobrokan Inggris

Kondisi Parah Demokrasi India – Daftar Kondisi Buruk India

Kondisi Buruk Demokrasi Afghanistan – Keadaan Parah Demokrasi Afghanistan

Tanya Jawab Mengenai Sistem Khilafah Islam – Penjelasan Khilafah Islamiyah

Kesimpulan Demokrasi Sistem Korup - Kerusakan Sistem Politik Demokrasi Sekular

Satu Pamflet oleh Hizb ut-Tahrir Britain

Hizb ut-Tahrir

Britain

22 Jumada al Awwal 1431 / 6 Mei 2010

www.hizb.org.uk

Democracy in Crisis

How the Islamic Political System ensures Good Governance [PDF]

Demokrasi dalam Krisis

Bagaimana Sistem Politik Islam Memastikan Good Governance

Demokrasi baik di Amerika dan Inggris sedang dalam interogasi akhir-akhir ini. Jauh dari bentuk antik para MP dan para anggota kongres, dikatakan bergeser ke arah oligarki, dengan peningkatan penekanan menjadi otokrasi. Uang dan kekuatannya atas teknologi semakin membuat pemilihan umum jadi tidak fair. Kompleks militer-industri adalah paling kuat saat ini, telah mengadopsi "ancaman terorisme global" sebagai casus belli-nya (alasan untuk menjustifikasi dimulainya perang). Lobi-lobi dan korupsi mempolusi proses pemerintahan. Singkatnya, demokrasi tidak berada dalam bentuk fit.

Betapa aneh untuk memilih momen ini untuk mengeksponnya, apalagi ke negara-negara yang tidak pernah mengalaminya sepanjang sejarah mereka. Barat tidak hanya mengekspor barang itu, ia melakukannya dengan cara kekerasan masif, anak berandalan, antitesis dari bagaimana pemerintahan-diri seharusnya menjadi dewasa dalam memimpin masyarakat di manapun. Pembenaan penyiksaan di Irak dan Afganistan adalah bahwa pemilu-pemilu dengan suatu cara akan bisa menyucikan "perang melawan terorisme" yang dikobarkan di tanah orang lain. Kematian dan kehancuran yang dihasilkan telah mencekam. Tidak pernah bisa suatu tujuan, bagaimanapun mulia, telah sangat gagal untuk menjustifikasi cara-cara pencapaiannya.

Simon Jenkins, Mantan editor the Times menulis dalam koran the Guardian 8 April 2010

Kata Pengantar

Apa yang mulanya adalah eksperimen di Athena lebih dari 2000 tahun yang lalu tiba-tiba melanda tiap benua dan tiap tanah. Demokrasi, Demokrasi, Demokrasi adalah panggilan yang diulang-ulang yang menggema dari 4 sudut globe. Ini adalah peraturan yang telah berlaku dalam dunia kacau dan tidak stabil, di mana setiap kritik terhadap demokrasi dipandang dengan kecurigaan anti-kemampuan. Untuk setiap problem politik, kita diberitahu, terdapat solusi demokratik. Untuk setiap peradaban, untuk setiap negeri atau setiap suku, untuk setiap waktu - berlaku mantra - demokrasi adalah jawaban yang diklaim untuk semua sakit kita. Dalam kata-kata puitis para aktivis RAWA (Revolutionary Association of the Women in Afghanistan - Asosiasi Revolusioner Wanita di Afganistan), demokrasi akan menyembuhkan semua luka dan membawa fajar kebebasan.

Hai, matahari kebebasan, Menyeruak dalam kegelapan, Demokrasi akan menyembuhkan luka-luka, Yang muncul dari tanah bernoda-darah. Hai, negeri bersedih, Lawanlah pelawanmu. Balaslah dendam untuk para martir, Pada musuh demokrasi dan wanita. Kita harus membawanya melalui pengetahuan, Melalui darah dan asap Kita harus membawa fajar kebebasan, pagi Demokrasi. Bendera Meena di pundak-pundak wanita Yang akan menyanyi dia adalah Rakyat kebanggaan kita, bangkit Melawan musuh-musuh demokrasi Dalam balas dendam untuk darah para martir kita tercinta Dan sebagai satu pesan untuk para pejuang kalian.

Namun demikian peristiwa-peristiwa baru-baru ini sesuai dengan pernyataan oleh John Adams, Presiden kedua Amerika Serikat. "*Ingat demokrasi tidak akan pernah bertahan lama. Ia akan segera menyiakan, melelahkan, dan membunuh dirinya sendiri. Tidak pernah ada suatu demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.*" Pernyataan Adams adalah benar dahulu dan dengan cepat semakin menjadi benar sekarang, terutama di dunia Barat, jantung tanah air persemiaan demokrasi. Korupsi, ketidak-kompetenan, utang bertumbuh dan perasaan bahwa politik tidak bisa berfungsi untuk orang biasa sekarang melanda di seluruh jika tidak semua negara-negara besar demokratis.

Terlebih lagi, sejak 9-11, demokrasi telah menyembelih begitu banyak sacred cows - para naif, tercebur ke dalam kerendahan moral yang makin dalam dan semakin menjadi apa yang tadinya, secara teoritis, seharusnya dilawan olehnya: kekuasaan korup, paranoid dan tiranikal.

Tapi sebelum kita masuk ke diskusi detail seputar kepantasan dan ketidakpantasan demokrasi, adalah penting untuk mendefinisikan secara akurat apa yang kita maksud dengan kata demokrasi - karena ia berarti banyak hal untuk banyak orang.

Beberapa pihak menggunakan istilah itu dalam pengertian linguistik : untuk mengkarakterisasi perilaku konsultatif. Seorang bos perusahaan dinilai demokratis jika ia berkonsultasi dengan tim mereka secara reguler, sebagai kebalikan dari mereka yang dianggap diktator ketika mereka membentakkan perintah-perintah dan berharap untuk dituruti. Yang lain-lainnya menunjuk pada bentuk apapun pemilihan umum - dari dewan sekolah hingga jabatan politik tinggi - sebagai demokratis.

Juga, berbagai masyarakat sekular liberal tidak memiliki monopoli atas klaim bahwa demokrasi milik mereka sendiri. Banyak negara-negara komunis selama era Perang Dingin mendeskripsikan diri mereka sendiri sebagai republik demokratik; dan bahkan Irak-nya Saddam Hussein punya pemilihan Presidensial. Tapi bagi mereka yang memiliki karakteristik kunci demokrasi pemilihan umum bebas dan adil tidak akan memberi legitimasi demokratis pada mereka yang dalam negara-negara komunis atau dalam kediktatoran, di mana hanya satu partai yang eksis.

Pihak-pihak lainnya melihat demokrasi sebagai lebih dari sekedar pemilu - bahwa demokrasi harus dikarakterisasi oleh nilai-nilai dan institusi-institusi lain. Bahwa di samping pemilu reguler harus ada nilai-nilai liberal, dewan legislatif yang berfungsi, oposisi yang kuat, media yang merdeka, masyarakat sipil - civil society dan suatu kehakiman independen.

Bagi beberapa pihak, terutama dari sudut pandang libertarian, demokrasi tidak boleh disamakan dengan liberalisme; yaitu liberalisme yang dianggap sebagai tujuan akhir, sedangkan demokrasi harus dibatasi dalam rangka mencegah suatu negara menjadi tidak liberal karena ditetapkannya legislasi otoritarian. Itulah mengapa banyak yang mendeskripsikan Amerika Serikat sebagai suatu republik bukannya suatu demokrasi.

Untuk tujuan-tujuan pamflet ini, kami telah mendefinisikan demokrasi sebagai **sistem politik yang menginstitutionalkan kedaulatan legislatif - baik pada rakyatnya secara langsung - maupun pada para representatif terpilih mereka.**

Pamflet ini berusaha menyatakan sistem demokrasi sebagaimana diartikulasikan dan diimplementasikan dalam sebagian besar demokrasi-demokrasi yang telah matang dan yang baru muncul di dunia saat ini. Asumsi kunci yang lain yang kita buat adalah bahwa kita percaya bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari sekularisme. Meskipun banyak yang berargumen bahwa agama dan demokrasi adalah kompatibel, ini mungkin benar dalam arena privat tapi tidak berlaku dalam ruang publik - di mana tidak agama tidak juga demokrasi bisa menikmati kepentingan utama, tidak dalam waktu bersamaan. Agama-agama dari asalnya percaya bahwa hukum-hukum dan nilai-nilai adalah produk dari wahyu

ketuhanan tanpa campur tangan manusia sedangkan demokrasi adalah tentang menjadikan segala sesuatu sebagai di bawah olah pikir manusia dan menghasilkan hukum-hukum berdasar jumlah mayoritas.

Pamflet pendek ini dibagi menjadi tiga bab. Bab pertama berusaha menampilkan berbagai kelemahan teoretikal demokrasi sekular dan mengartikulasikan suatu kritik yang lebih dalam terhadap pilar-pilar utama yang menancapkan model demokrasi sekular. Yang kedua menggunakan studi-studi kasus singkat demokrasi sekular dalam praktek untuk mengilustrasikan berbagai kelemahan teoretikal yang ditekankan sebelumnya - Amerika Serikat, Inggris dan India - juga demokrasi sekular yang sedang muncul di Afghanistan. Kita akan mengilustrasikan berkembangnya jarak antara retorika dan realita dalam negara-negara demokratis itu. Dalam bagian terakhir kita menggunakan format tanya jawab untuk memberikan ringkasan sistem Khilafah Islam. Meskipun tidak ada yang menyarankan bahwa ia adalah alternatif dekat bagi negeri-negeri non-Muslim, demikian tidak bisa dikatakan pada dunia Muslim, di mana Khilafah memiliki solusi-solusi berpengalaman dan berkepercayaan dan benar-benar alternatif praktikal. Tentu, implementasi manusia di dalam Khilafah tidak akan sempurna bagaimanapun juga, tapi bagi mereka yang yakin bahwa sumber-sumber legislasinya lahir dari entitas ketuhanan (yang eksistensinya harus dibuktikan secara rasional oleh kaum Muslimin sebagai syarat) yang benar-benar mengetahui kompleksitas hidup dan fitrah manusia; sesuatu yang oleh manusia sendiri tidak akan bisa dipahami. Prinsip-prinsip Islam dari sifat dasarnya bukanlah subjek hawa nafsu personal, perubahan konstan, perubahan politik atau kengawuran publik di mana di saat yang bersamaan tetap cukup fleksibel melalui proses Ijtihad untuk mengatasi realitas-realitas baru.

Pendahuluan

Seiring program-program partai menjadi semakin mirip, dan seiring kampanye-kampanye selalu berorientasi lebih pada tujuan-tujuan sama bukannya cara bertentangan, terdapat pengecilan derajat sejauh mana hasil-hasil elektoral bisa menentukan aksi pemerintah. Terlebih lagi, seiring perbedaan antar partai-partai berkuasa dan yang tidak berkuasa menjadi semakin kabur, derajat sejauh mana para pemilih bisa menghukum partai-partai bahkan atas dasar ketidakpuasan umum adalah berkurang. Di saat yang sama partisipasi dalam proses pemilihan mengimplikasikan voting dan dengan membuat pemilu sebagai saluran legal untuk aktivitas politik, saluran lain yang berpotensi lebih efektif, menjadi berlegitimasi. Demokrasi menjadi suatu cara mencapai kestabilan sosial bukannya perubahan sosial, dan pemilu menjadi bagian 'terhormat' konstitusi"
Richard S. Katz and Peter Mair, *How Parties Organise*

Sementara sebagian besar politisi dalam demokrasi mengklaim mantel 'perubahan', sangatlah sedikit pernah benar berubah. Terlebih lagi, skandal-skandal politik jauh dari menjadi peristiwa-peristiwa terisolasi atau kejanggalan dalam sistem demokrasi sekular. Kecurangan anggaran, para mantan-Menteri menjadi "taksi-taksi untuk disewa", dana untuk mempengaruhi legislasi dan berbagai pinjaman untuk kelompok penguasa (baronage) semua ini baru contoh yang di Inggris saja. Tuduhan usaha penjualan kursi Senat di Illinois dan seorang anggota kongres dengan ribuan dollar di freezer lemari es-nya di Amerika Serikat adalah episode-episode mengagetkan yang mirip. Bisa dikatakan bahwa di Amerika kelas politiknya telah dijual beberapa waktu lalu kepada kelompok-kelompok bertujuan khusus (special interest) - sedemikian banyak sehingga Washington DC telah menjadi kiasan untuk korupsi terorganisasi dan terinstitusionalisasi. India, dianggap oleh banyak pihak sebagai demokrasi sekular terbesar, juga dianggap sebagai yang paling korup. Para politisi baik di tingkat federal maupun propinsi telah menghisap negara itu sampai kering sejak desentralisasi / partisi di 1947. Israel digemborkan sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Namun apa yang ia katakan tentang pemerintahannya ketika seorang mantan Presiden sedang disidang karena pemerkosaan dan seorang mantan Perdana Menteri karena korupsi? Demokrasi yang sedang berkembang tidak lebih baik dari itu. Pemilu-pemilu di Kenya, Afghanistan dan Pakistan semuanya telah menghasilkan elit korup, dan pergantian Russia ke demokrasi telah memproduksi suatu oligarki yang lebih tertarik menghasilkan uang daripada melayani publik. Saripatinya demokrasi dari negara ke negara hanya mendukung elit seiring meneruskan propaganda bahwa semua orang punya kekuatan yang sama di dalam demokrasi.

Namun demikian, para suporter demokrasi sekular tidak menerima premis ini. Dalam pandangan dunia mereka demokrasi bukanlah sistem sempurna tapi, untuk memparafrase Churchill, itu adalah lebih baik daripada semua yang lain.

Bagi mereka demokrasi adalah tiada terkira lebih hebat daripada rivalnya, dan kematian berbagai monarki abad pertengahan, Soviet Russia, Nazi Jerman dan para diktator sekeliling globe hanya memvalidasi opini mereka. Bagi mereka demokrasi berhasil karena itu adalah, dalam kata-kata Abraham Lincoln, "pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat." Sebagai tambahan mereka mengutip pertumbuhan jumlah negara-negara di seluruh dunia yang memeluk demokrasi sekular.

Pemilu-pemilu memang telah diadakan beberapa waktu lalu di Afganistan dan Irak dengan jutaan orang datang untuk voting setelah puluhan tahun dilarang punya kesempatan itu. Namun ini bukan sekedar pemilu yang mengikat kedua negara itu bersama; faktor kesamaan lainnya adalah bahwa negara-negara itu sedang dalam penjajahan asing ketika pemilu. Ini dengan sendirinya membatalkan konsep apapun tentang pemilu-pemilu itu sebagai praktek dalam mengukur apakah suatu pemerintahan atau seorang pemimpin memiliki legitimasi terpisah dari yang disuguhkan oleh otoritas penjajah. Menggunakan analogi yang bisa diapresiasi oleh kebanyakan mahasiswa sejarah Amerika, yang demikian itu adalah seperti halnya para bapak pendiri mengadakan pemilihan umum ketika para pasukan Inggris masih menguasai Philadelphia di tahun 1776 di bawah suatu konstitusi yang disetujui oleh Westminster. Demikian maka tidak mengherankan bahwa para pemimpin sekular pro-Barat telah dipilih di Kabul dan Baghdad. Juga tidak bisa diasumsikan bahwa karena rakyat menolak kediktatoran, berarti mereka pasti mendukung ide-ide politik Barat.

Sebagai tambahan pemilu-pemilu, demokrasi Barat juga juara dalam pemisahan negara dan agama, nilai-nilai liberal terhadap perilaku personal, demikian juga kapitalisme, dengan kebijakan tak terkontrol pasar bebasnya. Masyarakat Barat mempromosikan individualisme, hedonisme dan utilitarianisme, dengan kepercayaan dan moral disimpan rapat ke arena privat. Terdapat sangat sedikit bukti bahwa orang-orang di Kabul (apalagi Kandahar), Baghdad atau Kairo mendukung atau menerima bahwa Islam harus dimarginalisasi dalam masyarakat dan disimpan hanya untuk wilayah masjid, tidak juga mayoritas menerima bahwa seseorang punya kebebasan untuk melihat pornografi atau melakukan zina. Tidak juga mayoritas akan setuju dengan hukum-hukum yang membolehkan alkohol, tempat-tempat judi atau kapitalisme pasar bebas dengan semua akibat buruknya; meski begitu ini semua adalah norma dalam demokrasi Barat. Ini persis dikarenakan berbagai perbedaan besar dalam nilai-nilai dan pondasinya bahwa mayoritas warga negara Eropa dan banyak pemimpin European Union gelisah tentang pendaftaran Turki ke EU. Jika Turki setelah 8 dekade sekularisasi fanatis oleh militer, telah tidak mampu merestruktur secara fundamental nilai-nilai jutaan orang Turki, adalah sangat tidak mungkin bahwa Timur Tengah akan membeli Thomas Jefferson dalam waktu dekat, terutama sejak mereka menyaksikan hari demi hari akibat 'perang terhadap teror' Barat.

Ledakan balik akhir-akhir ini terhadap para politisi adalah bagian dari kematian ideologis yang jauh lebih luas. Kaitan umum antara berbagai skandal politik, bencana perekonomian, perang di Irak dan model sosial gagal adalah bahwa mereka semua lahir dari sistem demokrasi sekular. Ekses, ketamakan, individualisme dan materialisme adalah buah-buah kapitalisme dan sistem nilainya yang gagal. Sebagaimana 'para bankir rakus' telah menjadi wajah bencana para Kapitalis, dan Guantanamo Bay dan Abu Ghraib dilihat sebagai komitmen Barat pada Universal Human Rights, sehingga para politisi korup telah menjadi wajah dari penipuan demokrasi. Negara-negara sekular, demokratis, kapitalis semua menderita hingga derajat lebih kecil atau lebih besar pembusukan ideologis ini. Runtuhnya perekonomian pastinya adalah yang paling menyebar dan membuat jatuhnya korban tidak hanya warga negara di masyarakat Barat, tapi pada orang miskin dunia yang tadinya dijanjikan bahwa Kapitalisme akan menjadikan kemiskinan sejarah. Tapi aspek-aspek lain jalan hidup Barat tidak kalah berbahaya dalam janji-janjinya. Adalah pemisahan hampir total Tuhan dari kehidupan kolektif yang telah meninggalkan masyarakat untuk didominasi oleh nilai-nilai material. 'WIFM' - 'what's in it for me' adalah pertanyaan fundamental yang ditanyakan orang pada dirinya sendiri, dan bukan 'bagaimana aku akan dihakimi atas perilakuku'. Masyarakat Barat bisa dikatakan telah membatasi semua nilai-nilai selain material pada rumah dan ruang pribadi. Ketika nilai-nilai demikian dibuang ke sisi batas masyarakat, ketika kesuksesan dan kegagalan dinilai semata berdasarkan kekayaan yang kamu miliki, harga rumahmu dan apa yang kamu miliki secara materi, adakah kesangsian bahwa para politisi atau bankir berperilaku seperti yang mereka lakukan, tidak pandang di mana seseorang tinggal.

Namun beberapa pihak berargumen bahwa masalah-masalah yang muncul adalah karena buruknya implementasi dan suatu kelas politik yang telah kehilangan pengekangannya. Meski begitu masalah demokrasi sekular berasal bukan dari implementasi yang buruk melainkan dari pondasi-pondasi lemah teoretisnya. Pandangan bahwa hukum-hukum menjadi superior atas hukum-hukum lain berdasarkan jumlah orang yang mem-votingnya adalah absurd adalah berbahaya. Kita jelas tidak menentukan kemajuan saintifik berdasarkan jumlah orang yang mendukung suatu posisi, jika kita melakukannya maka Galileo, Copernicus dan ratusan ilmuwan yang mengatakan kebenaran dan yang berjuang melawan opini publik pasti salah. Kita menentukan pengadilan berdasarkan kualitas bukti bukannya superioritas numerik saksi-saksi di suatu sisi. Jika orang, seperti yang mereka lakukan di 1930-an, voting untuk pemimpin yang populis yang nantinya membunuh jutaan orang dan memulai suatu perang dunia, apakah ini memvalidasi pilihan mereka hanya karena mereka merupakan suatu mayoritas di suatu waktu. Tidak.

Kata 'demokrasi' (kekuatan rakyat) itu sendiri berakar di bahasa Yunani adalah penjelasan nyata. Inilah mengapa sepanjang masa dari Socrates hingga Jefferson, dari Plato hingga Stuart Mill konsep kekuasaan geng dan tirani mayoritas adalah

ketakutannya. Frase ini "tirani mayoritas" adalah aslinya dikutip dalam Alexis de Tocqueville dalam bukunya 'Democracy in America' dan kemudian diambil oleh Mill dalam karyanya 'On Liberty'. Perhatiannya adalah bahwa hukum-hukum tidak ditentukan berdasarkan keuntungan masyarakat oleh mayoritas tapi akan sebaliknya berakar dalam kepentingan sendiri - self interest, semangat emosional dan kepicikan, dan usaha merampas hak-hak minoritas. Sebagaimana dinyatakan Thomas Jefferson "Demokrasi adalah tidak lebih dari kekuasaan geng, di mana 51% orang bisa mengambil hak-hak 49% yang lain". Plato dan Aristotle khususnya bermusuhan dengan dogma-dogma demokrasi. Melalui karya berpengaruh mereka, setelah penemuan kembali klasik-klasik selama renaissance, kestabilan politik Sparta dipuji sedangkan demokrasi Periclean dideskripsikan sebagai sistem kekuasaan, di mana yang cacat lahir, geng (sebagai tirani kolektif) atau kelas-kelas miskin, memegang kekuatan kekuasaan. Solusi Mill bahkan lebih radikal menyarankan untuk tirani mayoritas adalah bahwa untuk memiliki representasi proporsional dengan hak suara ekstra bagi yang kaya dan yang terpelajar untuk mengalahkan voting mayoritas yang kurang terpelajar. Winston Churchill juga berkelakar bahwa argumen utama melawan demokrasi adalah satu 10 menit perbincangan dengan pemilih rata-rata.

Menyadari kelemahan cacat fundamental ini, masyarakat Barat telah berusaha menekan beberapa efek lebih keras 'mob rule' dengan berbagai cek konstitusional dan politikal. Di AS hadirnya Supreme Court, suatu supermajority dihadapannya perubahan-perubahan konstitusional bisa dibuat dan hadirnya berbagai cek dan perimbangan - checks and balances telah diterapkan, tapi dengan mengorbankan prinsip-prinsip utama demokrasi seiring juga menyebabkan luapan masalah-masalah lain. Kebuntuan, korupsi, kendali disproporsional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bertujuan spesial - special interest groups dan pertimbangan-pertimbangan jangka pendek elektoral dalam mengakali berbagai tantangan jangka panjang adalah hanya beberapa tuntutan terhadap demokrasi hari modern. Skandal pembelanjaan dan pe-lobby-an di Inggris adalah gejala kelas politik yang telah melupakan apa seharusnya melayani publik itu.

Demokrasi sekular, dengan basis kedaulatan popularnya, belum ditantang secara efektif hingga sekarang baik kiri maupun kanan belum terlibat dalam debat apapun tentang kelayakan demokrasi sekular. Kebanyakan pemimpin Barat percaya bahwa demokrasi adalah nirwana sistem politik modern bahwa nilai-nilai demokrasi sekular adalah universal. Namun sebagaimana Pat Buchanan dengan tepat mengamati, "penyembahan-demokrasi menyarankan suatu kepercayaan kekanak-kanakan dalam kebijaksanaan dan kebaikan masyarakat." Mayoritas orang hari ini akan mengembalikan hukuman mati (untuk kejahatan seperti paedophilia dan perkosaan), kebanyakan orang akan percaya bahwa gelombang masuk orang mencari rumah sakit mental meningkatkan kejahatan, mayoritas orang Amerika di selatan pada abad 19 mendukung perbudakan dan mayoritas orang Jerman memilih Hitler dan mendukung the Nuremburg laws di 1930-an.

Para pendiri Amerika tidak lebih percaya pada masyarakat daripada mereka percaya pada monarki absolut.

Maka kebutuhan untuk multiple checks and balances - suatu badan pemilih (electoral college), suatu Supreme Court, suatu Senat terpilih untuk mengawasi House of Representatives (DPR) dan kekuatan veto seorang Presiden. Demokrasi, berkebalikan dengan apa yang orang umum pikirkan, adalah bahkan tidak disebutkan di dalam konstitusi Amerika Serikat dan itu bukan kesalahan membaca. Thomas Jefferson telah sangat menjelaskan apa yang dia pikirkan tentang menyerahkannya pada rakyat ketika dia mengatakan: "Jangan dengarkan percaya pada orang-orang (rakyat), tapi sebaliknya kekang mereka dari kejahatan dengan rantai-rantai konstitusi". Bagaimana bisa demokrasi dengan dogma sentral kedaulatan popular bisa dianggap serius oleh dunia Muslim ketika para pendiri konstitusi AS sendiri sangatlah alergi terhadapnya?

Etos Islam memastikan bahwa masyarakat adalah lebih rata terseimbangkan antara nilai-nilai material, moral, humanitarian dan spiritual. Para politisi harus memiliki pondasi kuat berakar dalam nilai-nilai yang berkorelasi kuat dengan membantu kebutuhan warganya. Ini adalah, pada akhirnya, hanyalah atmosfer kesadaran akan Tuhan bergandengan dengan hukum-hukum terinspirasi secara ketuhanan yang mengatur intisusi-institusi detail yang bisa memastikan sistem politik yang lebih efektif.

Bab 1 Mengapa Teori Demokrasi Tidak Bisa Dipertahankan

Sejarahanya demokrasi satu-satunya adalah diinstitusikan di Athena 508 BC oleh Cleisthenes. Setiap warga laki-laki berusia lebih dari 18 tahun adalah warga negara, boleh mengumpulkan teman-temannya di atas sisi bukit, di mana, setelah mendengarkan berbagai pemimpin politik, dia bisa melakukan voting dengan warga lainnya mengenai masalah perang dan kedamaian dan semua hal lain yang dibahas di hari itu. Pada 322 BC Alexandra of Macedon menguasai Athena dan mengeliminasi demokrasi mereka, yang tidak pernah lagi dicoba oleh suatu negara layak - proper state (bukan seperti pertemuan kota periodik New England). Gore Vidal, Inventing a Nation

Sebelum kita memasuki detail pembantahan model demokrasi sekular adalah penting untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip berikut ini harus tidak dipertentangkan

1. Para pemimpin dalam masyarakat manapun harus dipilih dan ditetapkan akuntabel atas semua aksi mereka.
2. Partai-partai politik yang mematuhi konstitusi harus diperbolehkan bekerja di dalam sistem.
3. Para pemimpin politik harus merepresentasi kepentingan-kepentingan semua rakyat bukannya hanya elit sempit.
4. Harus terdapat pengadilan yang independen dari eksekutif, yang bisa meminta pertanggung jawaban eksekutif.
5. Warga negara dari setiap keyakinan, ras atau jender - tidak-cacat atau cacat - harus memiliki hak-hak yang sama di bawah negara.
6. Tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum
7. Penangkapan, penahanan tanpa alasan, penyiksaan dan penyerahan tahanan untuk disiksa di negara lain harus dilarang sepenuhnya.

Sebagaimana diartikulasikan prinsip-prinsip di atas dianggap kritikal untuk berfungsinya peradaban, tapi kita akan berargumen model demokrasi sekular gagal dalam hal prinsip-prinsip di atas. Dalam bagian ini kita akan mendiskusikan poin-poin berikut.

1. Bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak kunci dapat dengan mudah ditahan. Bagaimana Demokrasi dapat sama dengan kekuasaan geng
2. Keputusan-keputusan mayoritas tidak berarti menjadi hukum-hukum yang baik
3. Pemilihan periodik mendukung mereka yang punya uang dan merugikan pembuatan keputusan jangka panjang yang sulit. Politik menjadi berkutat sekitar melayani elit bukannya publik

Bagian 1 Bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak kunci dapat dengan mudah ditahan. Bagaimana Demokrasi dapat sama dengan kekuasaan geng

a. Adalah suatu ironi jalannya politik pasca 9-11 bahwa 'perang terhadap teror' ditetapkan sebagai pertempuran untuk mempertahankan kebebasan. 11 September 2001 tidak hanya menghasilkan pembunuhan 3.000 orang tapi juga bertanggung jawab atas pembunuhan sistem nilai Barat yang berada dalam kesulitan berhadapan atau beradaptasi dengan berbagai tantangan baru lingkungan internasional.

b. Suatu sistem nilai yang lahir dari perjuangan berabad-lama melawan pejabat agama opresif, dan yang bisa mengalahkan berbagai monarki absolut, fasisme dan komunisme sekarang mendeklarasikan kekalahan implisit di altar musuh barunya. Ini bukan kekalahan dalam arti militer (tapi dalam arti hampir semua peradaban yang akhirnya mengikutinya) tapi ini adalah jelas kekalahan dalam arti politik dan ideologi.

c. Sekarang beberapa pihak mungkin berargumen bahwa berbagai perubahan sejak 9-11, meskipun membalik keseimbangan keamanan vs. kebebasan, tidak mengubah struktur dasar ideologi masyarakat liberal. Namun pengabaian presumsi tidak bersalah, hak untuk persidangan adil, pemisahan kekuasaan dan hak untuk memahami bukti yang digunakan untuk memenjarakanmu, bukanlah sekedar catatan kaki kehidupan politik untuk diubah semauanya; semua itu seharusnya adalah landasan tradisi politik Barat. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan kesimpulan lain dari ini ketika nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tradisi-tradisi fundamental - jiwa politik itu sendiri - menjadi ekuivalen dengan 30 keping perak?

d. Ketika para politisi mengklaim bahwa kebebasan sipil terbesar adalah hak untuk hidup dan untuk negara menjadi aman, ini akibatnya menggusur nilai-nilai kunci lain yang banyak diperjuangkan ke dalam kotak sampah. Jika hak untuk hidup benar-benar adalah hak yang paling penting, negara-negara tidak akan pernah pergi perang untuk mempertahankan nilai-nilai fundamental, berisiko menempatkan putra-putra dan putri-putri mereka dalam berbagai konflik brutal. Jika Perang Dunia Kedua adalah tentang cuma melindungi nyawa, maka Churchill akan menerima tawaran Hitler untuk menyerah, maka menyelamatkan ribuan prajurit dari horor pertempuran dan kota-kota Inggris dari pengeboman brutal.

e. Alasan melindungi keamanan negara adalah argumen tua yang digunakan oleh para diktator dan tiran sepanjang masa dan digunakan secara konstan oleh rezim-rezim dari Pongyang hingga Harare untuk mempertahankan berbagai kebijakan kejam. Namun rezim-rezim itu tidak pura-pura menjadi

sesuatu yang lain dan tidak juga mereka berusaha mempromosikan nilai-nilai mereka ke luar negeri. Adalah promosi aktif demokrasi sekular ke luar negeri sementara secara simultan mengabaikannya di rumah itulah kemunafikan terang-terangan. Dalam menggulung demokrasi di rumah, Barat telah kehilangan kepemimpinan moral untuk berkutbah pada negeri-negeri di luar, meremukkan secara serius para aktivis pro demokrasi di luar negeri yang mereka klaim mereka dukung.

f. Peristiwa-peristiwa sejak 9-11 bukanlah pertama kalinya nilai-nilai Barat gagal dalam tes kredibilitas ketika berhadapan dengan tekanan ketat. Pada 1861, Abraham Lincoln, dianggap banyak orang sebagai Presiden Amerika Serikat terhebat, mengabaikan hukum sipil di berbagai teritori tertentu dan menguasai semua kewenangan yang tidak didelegasikan padanya dalam konstitusi. Pada 1862 dia mengabaikan habeas corpus dan di bawah hukum militer memenjarakan 13.000 anggota 'Copperhead Democrats', suatu kelompok yang menentang perang itu dan yang mengusahakan konvensi konstitusional baru untuk membentuk suatu amandemen untuk melindungi hak-hak negara bagian. Ketua Keadilan Pengadilan Tinggi - The Chief Justice of the Supreme Court menyatakan tindakan-tindakan Lincoln inkonstitusional. Bukannya mematuhi aturan hukum, pondasi tradisi Barat, Lincoln menerbitkan surat penahanan terhadap Ketua Mahkamah umur-84-tahun itu.

g. Demikian juga selama Perang Dunia Kedua, Franklin Roosevelt, memenjarakan 120.000 orang Amerika asal Jepang dalam kamp-kamp konsentrasi darat melalui penandatanganan Executive Order 9066; satu-satunya kejahatan mereka adalah asal ras mereka. Pada 2006 George W Bush menandatangani hukum the Military Commissions Act yang menyangkal hak-hak fundamental apapun para musuh dan melanggar Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap para tahanan.

h. Guantanamo Bay, Belmarsh, Abu Ghraib, Bagram, the Patriot Act, legislasi anti-terorisme dalam semua penyamarannya, stop and search, penahanan, penyiksaan, pelecehan seksual, penangkapan atas perintah eksekutif, pemenjaraan tanpa pengadilan, penyerahan para tersangka pada rezim-rezim tiranikal, interogasi brutal dan perang-perang ilegal dan imperialistik bukanlah satu-satunya bukti peradaban yang dalam kejatuhan, meski itu adalah benar tanda-tanda yang kuat.

i. Bukti yang lebih menerangi adalah kebisuan massal (dan bahkan dukungan aktif) publik Barat dan para representatif mereka sementara hal-hal itu terjadi. Memang keseluruhan populasi Barat yang dipengaruhi oleh geng tampil seiring pers tabloid telah mendorong populasi mereka untuk melakukan yang terburuk. Sejauh ini tidak pernah ada demonstrasi jalanan atas penggulangan hak-hak dan nilai-nilai legal sejak 9-11. Faktanya, polling opini mengindikasikan dukungan kuat bagi legislasi keras anti-teror dan teknik-teknik interogasi baik di AS maupun UK.

Bagian 2 Mayoritas tidak berarti menjadi hukum-hukum yang baik

a. Salah satu pilar fundamental demokrasi adalah bahwa legislasi dihasilkan melalui voting mayoritas. Dalam ketiadaan teks ketuhanan, kebutuhan untuk menghasilkan legislasi harus bersumber dari tempat lain. Namun sumber legislasi dan bagaimana hukum-hukum dihasilkan adalah subjek debat yang hebat. Pada dasarnya bisa terjadi sejumlah variasi model.

b. Populasi berpartisipasi secara langsung dalam menghasilkan legislasi seperti yang disaksikan di Athena lebih dari 2.500 tahun yang lalu, di mana mayoritas rakyat mendapat jatahnya. Model ini secara umum hanya bisa diterapkan untuk kota-kota kecil - rakyat Athena kuno tidak membolehkan demokrasi untuk mereka yang telah mereka kuasai. Namun dengan kemajuan teknologi beberapa orang sekarang menyerukan untuk lebih banyak legislasi dihasilkan dengan cara ini.

c. Warga negara memilih para representatif mereka secara periodik yang kemudian akan mem-voting terhadap legislasi. Ini adalah model yang dipilih di kebanyakan demokrasi maju dan hukum-hukum kemudian secara umum disahkan melalui voting mayoritas.

d. Suatu dewan pakar yang merupakan para ahli dalam legislasi tertentu bertanggung jawab atas masing-masing bagian legislasi. Model ini umumnya tidak diterapkan dalam negeri demokratik karena itu dianggap anti demokratis. Namun, banyak orang termasuk Socrates dan Plato telah menyerukan model ini, percaya bahwa membolehkan orang-orang biasa / awam atau orang tak berkeahlian punya peran dalam politik adalah berbahaya.

e. Namun bahkan di dalam model kedua yang disukai terdapat sejumlah masalah. Sebagai contoh suatu mayoritas numeris untuk menghasilkan hukum tidak berarti hukum yang lebih baik. Kebanyakan hukum-hukum dihasilkan melalui berbagai macam faktor dan masing-masing para representatif bebas menghasilkan hukum-hukum menggunakan kriteria apapun yang mereka inginkan.

f. Namun menghasilkan hukum-hukum juga dibatasi oleh pertimbangan konstitusional. Tidak ada hukum-hukum sebagai contohnya yang bisa disahkan bertentangan dengan konstitusi negara tanpa semacam super majority. Sebagai contoh di Amerika Serikat suatu mayoritas sederhana dari kedua Dewan tidak bisa mengusulkan perbudakan, meskipun ini demokratis, hal ini memerlukan perubahan pada konstitusi. Untuk mencegah demokrasi

dari melakukan penyimpangan seperti itu, berbagai cek anti demokratik seperti supermajority dan Supreme Court tanpa dipilih diadakan, suatu kenyataan eksplisit bahwa demokrasi murni bisa menghasilkan hasil-hasil beracun.

g. Para wakil terpilih menurut definisinya tidaklah terikat pada para pemilihnya. Pada intinya maka peran para pemvoting dalam demokrasi terbatas pada voting periodik juga lobby terhadap masing-masing legislasi. Meskipun individu-individu bebas untuk melobi, usaha lobby mereka sangatlah kalah jumlah oleh kepentingan-kepentingan yang lebih kaya dan kuat. Sebagai contoh dalam dekade terakhir sektor finansial menurut Centre for Responsive Politics membelanjakan hampir 4 milyar dollar dalam me-lobby kongres. Anggota publik biasa harus menggunakan sebuah email atau panggilan telepon dan oleh karenanya sangat diabaikan.

h. Seperti yang telah disebutkan hanya karena 51% rakyat memvoting untuk sesuatu atau mayoritas sederhana para politisi voting untuk sesuatu tidaklah menjadikan itu benar. Tidak juga memiliki supermajority menjamin hasil yang lebih baik. Jika suatu supermajority memutuskan untuk melegalkan penggunaan heroin atau melarang kontrasepsi atau melarang wanita Muslim mengenakan hijab, ini seluruhnya demokratis. Ide mayoritas numeris melegitimasi apa yang secara fundamental dibolehkan dan apa yang dilarang oleh karenanya adalah berbahaya.

i. Tidak juga memiliki Mahkamah Tinggi menyediakan pilihan anti gagal, sebagaimana telah dibuktikan oleh debat aborsi di AS. Memiliki sejumlah hakim untuk menentukan apa yang benar atau salah akibatnya adalah anti demokratis dan membatalkan keseluruhan prinsip memiliki legislasi yang didukung oleh persetujuan populer. Hakim-hakim harus menginterpretasi hukum-hukum dan menetapkan rakyat akuntabel bukan memainkan peran legislator cadangan.

j. Kemajuan saintifik tidak diputuskan atas mayoritas numerikal tapi atas kekuatan sains. Fakta bahwa mayoritas orang pernah percaya bahwa matahari mengelilingi bumi atau percaya bahwa dunia ini datar tidak memiliki arti apapun ketika menentukan apakah hal itu fakta saintifik. Mengapa legislasi penting harus diperlakukan berbeda?

k. Tidak juga demokrasi dipraktekkan dalam berbagai angkatan bersenjata, perusahaan atau tim olahraga. Apa yang dikira orang mungkin disukai, tapi pada akhirnya pembuatan keputusan harus berdasarkan apa yang benar dan apa yang salah bukan polling terakhir atau focus group atau ketertarikan populer.

l. Ini bukannya mengatakan bahwa dalam perkara-perkara teknis atau area-area rutin atau di mana prioritas-prioritas butuh diputuskan masukan dari publik tidak perlu dicari. Untuk menentukan membangun suatu jalan di suatu area adalah suatu keputusan publik atau apakah sampah harus dikumpulkan seminggu sekali atau semalam sekali. Sebagaimanapun area-area penting bagaimana masyarakat harus diatur, prinsip-prinsip perpajakan, pertahanan, dan sistem pengadilan kriminal tidak bisa diserahkan kepada selera opini publik. Seperti yang akan kita lihat dalam bagian terakhir Sistem Islam membuat perbedaan tepat seperti itu. Dalam area-area tertentu petunjuk ketuhanan telah menyelesaikan masalah secara fundamental, sebagai contoh perlindungan atas tempat-tempat ibadah non-Muslim, jenis-jenis pajak dan institusi-institusi politik apa yang harus ada. Di sini rakyat tidak memiliki hak apapun untuk menentang ini, baik mereka memiliki supermajority atau tidak. Namun di area-area lainnya hukum ketuhanan memberi mandat kepada penguasa untuk berkonsultasi dengan publik umum atau para ahli untuk memecahkan problem-problem praktikal dan menggunakan solusi yang efektif. Sistem Islam mendapatkan keseimbangan ini dengan baik, demokrasi sesuai sifat dasarnya tidak bisa.

m. Sifat dasar beracun bagaimana hukum-hukum dibuat dalam demokrasi sangatlah dipahami oleh para filosof, pemimpin, dan pendapat berpengaruh Barat sepanjang masa. Socrates dan Plato ganas melawan demokrasi di Yunani kuno. Jefferson dan Adams memahami bahayanya demokrasi murni, yang menjadi alasan mengapa AS adalah suatu republik dan mengapa demokrasi murni ditentang.

Bagian 3 Pemilihan periodik mendukung mereka yang punya uang dan merugikan pembuatan keputusan jangka panjang yang sulit. Politik menjadi berkutat sekitar melayani elit bukannya publik

a. Salah satu pilar model demokrasi adalah prinsip pemilihan umum periodik. Bahwa rakyat punya hak untuk memilih para pemimpin politik mereka, tapi juga memiliki hak untuk kemudian mendepak mereka dari jabatan.

b. Pemilu setiap 2, 3 atau 4 tahun maka adalah didesain untuk tujuan spesifik ini, untuk mempersilakan elektorat untuk menentukan apakah partai atau pemimpin yang berkuasa layak atas periode selanjutnya atau apakah oposisi yang seharusnya mendapat kekuasaan.

c. Di Amerika Serikat, pemilu terjadi untuk hampir seluruh jabatan politik mulai dari Jaksa Distrik (District Attorneys), hingga Walikota, ke Gubernur dan ke Kongres. Meski secara khusus periode seorang Presiden dan para Gubernur adalah 4 tahun, anggota-anggota DPR Amerika Serikat adalah semuanya dipilih setiap 2 tahun dengan para Senator memiliki periode 6 tahun.

d. Pemilihan umum adalah bisnis besar, tidak hanya bagi para politisi yang secara praktek harus menggalang uang sejak hari mereka menjabat. Tapi juga bagi media, para operatif politik, pengacara, organisasi polling dan sejumlah luas industri terkait lainnya. Pemilu presidensial terakhir memakan biaya milyaran dollar dengan mayoritas luas dibelanjakan pada iklan-iklan televisi berbayar.

Problem dengan seringnya pemilihan adalah dua sisi. Pertamanya semakin banyak pemilihan semakin banyak dibutuhkan uang. Bergandengnya uang dan politik adalah satu dari kanker-kanker utama dalam politik demokrasi. Keduanya frekuensi pemilu membiaskan / membelokkan para politisi dari melawan berbagai tantangan jangka panjang dan malah memberi mereka insentif untuk fokus pada popularitas jangka pendek. Sementara cakrawala perencanaan suatu negara harus diukur dalam hitungan abad, cakrawala politik berfokus pada mengelola siklus berita 24-jam dan bagaimana memenangkan pemilihan berikutnya.

e. Sebagai contoh seorang anggota DPR AS - US House of Representatives yang baru terpilih, dari hari pertama, harus merancang untuk menggalang jutaan dollar atau sekitar itu untuk kampanye pemilihan-kembali kamu dalam waktu 2 tahun. Oleh karena itu kamu membelanjakan waktu berlebihan untuk menggalang uang, berbasa-basi kepada para donor, dan menggaet orang yang mungkin tidak kamu sukai untuk menulis cek. Selain itu kamu berusaha menghindari voting-voting sulit sebab kemungkinannya semua manfaatnya hanya bisa dilihat bertahun-tahun lamanya dan mengapa meresikokan diri membuat orang menjadi antagonis yang bisa memilih untuk tidak memilihmu dalam waktu 2 tahun. Mempertahankan defisit, tidak mengatasi berbagai tantangan jangka-panjang dalam pendidikan, lingkungan, dana pensiun, energi atau kemiskinan pusat kota adalah normanya. Semua perkara itu membutuhkan pilihan-pilihan sulit dan solusi-solusi layaknya dari negarawan, tapi mengambil keputusan-keputusan demikian mirip dengan menulis catatan bunuh diri elektoral.

f. Para politisi demokrasi oleh karenanya harus menjilat pada berbagai konstituen penting menyadari bahwa mereka bergantung pada mereka untuk jumlah suara dan uang. Namun ini mengabaikan segmen-segmen penting masyarakat lainnya, anak-anak sebagai contoh tidak memiliki uang atau kantong suara. Tidak terdapat lobby anak-anak untuk mengimbangi mereka yang bicara untuk kepentingan bisnis atau pekerja atau para pensiunan. Sementara adalah anak-anak kita yang akan menghadapi defisit di masa depan, infrastruktur hancur, dan lingkungan yang tidak sustainable dan kekacauan sosial. Namun, para politisi bisa mengabaikan masa depan seiring kemungkinan elektoral mereka didasarkan pada saat ini dan sekarang. Adakah keheranan mengapa para politisi demokrasi oleh karenanya menghindari berbagai tantangan besar?

g. Sebagai tambahan apa yang dibingungkan para komentator demokrasi adalah mencampuradukkan frekuensi pemilu dengan pemerintahan efektif. Bahwa pemilihan umum adalah suatu cek atas para penguasa yang jika tidak akan berlaku korup, takabur atau sekedar menjadi terlalu lelah untuk memerintah. Namun terdapat banyak contoh para pemimpin dalam politik, olahraga dan bisnis yang telah memimpin untuk periode waktu yang lama tanpa mengalami berbagai karakteristik tadi. Sebagai contoh suatu alternatif untuk demokrasi di satu sisi dan kediktatoran atau monarki absolut di sisi yang lain adalah pemilihan seorang penguasa tanpa akhir periode sebagaimana terdapat di dalam sistem politik Islam. Ini memungkinkan rakyat di satu sisi untuk secara bebas memilih pemimpin mereka tapi di sisi yang lain memberikan pemimpin itu waktu untuk mengambil keputusan-keputusan sulit jangka-panjang bagi kemaslahatan publik.

h. Esensinya semakin banyak pemilihan yang kamu miliki semakin besar kemungkinan kamu mencemari sistem kamu dengan uang dan cara pikir jangka pendek. Sayangnya inilah yang kita saksikan di Barat, negara-negara yang didominasi oleh kepentingan-kepentingan kuat, diinfeksi oleh korupsi politik dan dengan berbagai defisit membubung dan berbagai masalah jangka-panjang lainnya dibiarkan tidak diatasi. Apa yang pada akhirnya terjadi dari ini adalah para politisi gagal dalam tugas fundamental mereka, yaitu untuk melayani publik. Esensinya para politisi menjadi berobsesi dengan masa depan mereka bukannya masa depan negara. Mereka fokus pada kepentingan mereka bukannya kepentingan rakyat.

Adalah jelas hari ini bahwa demokrasi sekular menghadapi krisis berproporsi masif. Namun, rakyat tidak setuju tentang bagaimana memecahkan krisis ini. Pandangan konvensional di Barat adalah bahwa kita bisa membersihkan sistem dengan menghadirkan reformasi-reformasi. Namun solusi ini tumbuh dari kesalahan diagnosis masalahnya. Sistemnya tidak rusak karena terdapat para politisi rusak; tapi para politisi menjadi rusak karena sistem yang mendasarinya rusak, seperti telah kita tunjukkan di atas, cacat. Jika kasusnya adalah beberapa apel busuk di suatu negara atau politik di demokrasi tertentu adalah lebih buruk daripada semua yang lain, seorang bisa membuat suatu kasus ini untuk reformasi. Tapi seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya, masalah mendasar ada dalam setiap demokrasi sekular, maju, baru muncul, besar, kecil, di barat atau di timur.

Mereka semua menunjukkan hal yang sama: mereka melayani elit dan bukan publik; para politisi mereka secara umum korup; kekayaan tetap terbatas pada minoritas kecil; dan berbagai tantangan jangka-panjang dihindari secara konsisten. Menantang berbagai kepercayaan dan nilai seseorang ketika semua itu jelas butuh ditantang adalah kurang berisiko, dalam jangka panjang, daripada mempertahankan melakukan hal yang sama berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda.

Bab 2 - Studi Kasus

Amerika Serikat

Retorika

Amerika Serikat menampilkan dirinya sebagai demokrasi yang paling maju di dunia. Dengan populasi 300 juta orang, ia memiliki populasi terbesar ketiga di dunia. Konstitusi Amerika Serikat dianggap konstitusi standar emas yang menyatakan setiap manusia dilahirkan setara dan menjamin kebebasan melalui Bill of Rights. Deklarasi Kemerdekaan AS - The US Declaration of Independence menjanjikan kehidupan, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan tanpa pandang keyakinan, ras atau gender.

Realitas

a. Ketidakadilan Ras Meski kemerdekaan yang diinginkan dalam Deklarasi Kemerdekaan dan kemerdekaan yang dijaga dalam Konstitusi dan Bill of Rights, opresi terhadap orang-orang berwarna (berkulit hitam) berlanjut selama hampir 2 abad. Setelah keputusan the Plessy v Ferguson di 1896, the Supreme Court menetapkan bahwa meski orang kulit hitam punya hak yang sama di bawah hukum, bahwa pemisahan ras adalah legal selama fasilitas-fasilitasnya sama. Hukum-hukum itu, dikenal sebagai Jim Crow laws, mempengaruhi setiap aspek kehidupan orang kulit hitam. Sebagai contoh, satu hukum Alabama 1958 menyatakan bahwa "Tidaklah melanggar hukum bagi orang kulit putih dan orang kulit berwarna bermain bersama ... dalam permainan apapun kartu, dadu, domino, papan checkers, kantung bilyar, bilyar, softball, bola basket, bola sepak, track, dan di kolam renang atau dalam konferensi atletik apapun".

b. Kehinaan melalui kebebasan berbicara Amandemen pertama meskipun melindungi hak untuk kebebasan berpendapat telah menghasilkan beberapa efek beracun. Tidak hanya pornografi dan kehinaan meluas, the Supreme Court dalam kasus tingkat tinggi baru-baru ini sedikit banyak membolehkan para korporasi dan berbagai lobi kepentingan khusus lainnya - special interest untuk membelanjakan jumlah uang tak terbatas pada para politisi sehingga menyemen peran mereka sebagai tuan pengendali sistem demokrasi. Selain itu sebagaimana dilaporkan the Economist amandemen pertama menjamin hak untuk pidato kebencian politis - political hate speech. Sebagai contoh para kandidat seperti seorang di Kansas City bisa menyiarkan iklan radio yang bisa bersifat anti-Semit dan terang-terangan rasis tanpa ada kekuatan dari stasiun-stasiun radio untuk menghentikan iklan-iklan seperti itu.

c. Korupsi Amerika Serikat mungkin pemimpin demokrasi di dunia tapi ia juga satu dari yang paling korup. Politik AS diinfeksi oleh berbagai kepentingan khusus, arus bolak-balik antara politik dan bisnis besar, keistimewaan politis - political favours, dan suap-menyuap. Meskipun di

permukaan berbagai pemilihan terjadi tiap 2 tahun, realitasnya adalah bahwa para pejabat jarang lepas. Di 2008, 94% para pejabat menang di House of Representatives dan 83% di Senate. Ini bukanlah karena kebetulan, karena keuntungan uang yang signifikan yang dinikmati oleh para pejabat dan kecurangan pembagian suara pembagian distrik - redistricting. Meski resesi global berbagai kepentingan khusus membayar para peloby Washington 3.2 Milyar dollar di 2008 atau 17 juta dollar setiap hari Congress ada dalam sesi. Pemilihan-pemilihan kongresional 2010 diestimasi memakan biaya mencengangkan 3.5 miliar dollar.

d. Kekuasaan untuk industri finansial Uang yang dibayarkan pada para politisi ditimbal balik melalui berbagai kompensasi luas yang dibayarkan kembali kepada mereka melalui berbagai cara. Melalui 700 milyar dolar pendanaan TARP bailout untuk sektor finansial mendapatkan begitu banyak publisitas buruk di 2008, ini hanyalah pucuk gunung es. Diestimasi oleh - US based Centre for Media and Democracy - Pusat Media dan Demokrasi berbasis di AS bahwa hampir 7 triliun dollar telah disiapkan untuk sektor finansial dengan 4.6 trilyun dollar dibayarkan dan 2 trilyun dollar masih dijanjikan, mayoritas luas dari Federal Reserve - bank sentral AS tanpa ada pengawasan kongresional.

e. Pemerintahan minoritas dipoles sebagai mayoritas Meskipun sifat dasar pemilu presidensial 2008, hampir 40% elektorat AS tidak voting di pemilihan terakhir. Tingkat non-partisipasi ini dalam pemilihan yang tampaknya historis, yang memiliki hasil orang Afrika Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memperoleh perhatian sedunia dan yang diliput dari dinding ke dinding oleh media hanya bisa dianggap sebagai problem serius. Presiden Obama mendapatkan sekitar 70 juta suara di seantero negara, namun 82 juta orang Amerika tidak acuh untuk memilih sama sekali dan 62 juta voting untuk kandidat-kandidat lain. Oleh karena itu 2 dari 3 elektorat AS yang bisa voting tidak voting untuk Obama, seorang yang mendapatkan kemenangan telak elektoral dalam hal margin badan-electoral - electoral-college - 365 suara mendukung 173 suara melawan.

f. Tingkat Kemiskinan Meskipun berbagai usaha oleh para politisi AS untuk menampilkan bahwa American dream adalah terbuka untuk semua orang, ini bukanlah kasusnya. AS memiliki problem akut dalam hal kemiskinan. Hampir 40 juta orang atau 13% dinilai berada dalam kemiskinan di akhir 2008. Menurut the Economist antara 1970 dan 2008 koefisien Gini suatu pengukur ketimpangan pendapatan tumbuh dari 0.39 ke 0.47 dan sementara orang-orang Amerika telah menggandakan pendapatan mereka dalam seperempat abad sebelum 1973, di seperempat abad sejak 1973 pendapatan mereka hanya tumbuh seperlimanya. Namun demikian ini belum menceritakan seluruh ceritanya. Prosentase keseluruhan kemiskinan di antara Hispanics dan Blacks adalah 23% dan 25%. Selain itu 19% anak Amerika di bawah umur 18 adalah di dalam kemiskinan.

Pengangguran di antara orang Afrika-Amerika hampir 2 kali orang kulit putih, pria dan wanita kulit hitam di Amerika mendapatkan 62 sen dari tiap dolar yang diperoleh orang kulit putih (sebagai perbandingan). Pada suatu waktu dalam masa kanak-kanak mereka, 1/2 anak Amerika akan menggunakan tiket makan - food stamps untuk makan. Sekitar 30 juta pekerja adalah pengangguran atau bekerja kurang dari kemampuannya - under-employed, dan bagi mereka yang masih bekerja, nilai tengah upah hari ini adalah 32.000 dollar setahun, itulah mengapa begitu banyak orang bekerja 2 pekerjaan berusaha melakukan pemenuhan.

g. Ketimpangan kekayaan Ketimpangan juga menjijikan. Di 1950-an dan 1960-an, para CEO perusahaan besar Amerika membawa pulang sekitar 25 hingga 30 kali upah pekerja biasa. Pada 1980 CEO perusahaan besar membawa pulang sebanyak 40 kali upah pekerja. Menginjak 1990, itu 100 kali. Dan menginjak 2007, para eksekutif di perusahaan terbesar Amerika memperoleh sekitar 350 kali bayaran karyawan rata-rata. Di banyak korporasi top, para kepala eksekutif mendapatkan lebih banyak setiap hari daripada bayaran para pekerja rata-rata dalam setahun. Dalam tuduhan lain demokrasi hari modern, dalam hal kekayaan finansial menurut Professor Domhoff di the University of California 1% teratas orang Amerika memiliki 43% dan top 10% memiliki 83% aset-aset finansial di negara. Oleh karenanya 1 dari 10 keseluruhan populasi memiliki mayoritas di negara.

h. Biaya Perang James Madison pernah mengatakan "Dari semua musuh kebebasan publik perang adalah, mungkin, yang paling mencekam karena itu meliputi dan mengembangkan tiap bakteri-bakteri yang lainnya. Perang adalah orangtuanya para pasukan; dari itu muncullah utang-utang dan pajak-pajak ... instrumen yang dikenal membawa banyak orang di bawah dominasi segelintir pihak Tidak ada negara bisa melestarikan kebebasannya di tengah peperangan kontinual". Amerika Serikat membelanjakan lebih banyak uang ke pertahanan daripada negara-negara berikutnya dijumlah, yang disamping kekerasan-kepalaan memelihara ideologi hegemonis, menciptakan ketidakstabilan koktail. Ini mungkin tampak bagus bagi para kontraktor pertahanan dan para pemegang saham mereka tapi tidak berguna bagi kestabilan dunia. Berkaitan dengan Irak dan Afghanistan Amerika Serikat telah membelanjakan hampir 1.1 triliun dollar sejak 2001 hanya pada menghidupi perang dan pengeluaran terkait lainnya, suatu fraksi yang dibutuhkan untuk secara serius menjegal kemiskinan global.

i. Rekor utang anggaran Menurut Cicero (106-43 BC) "Bujet harus diseimbangkan; kas harus diisi ulang; utang publik harus dikurangi; dan arogansi para pejabat publik harus dikendalikan". Namun situasi utang Amerika Serikat sekarang adalah pada tingkat tidak stabil. Saat ini berada pada sekitar 13 triliun dollar dan tumbuh dengan tingkat 4 milyar dollar sehari. Meski rekor utang dan berbagai defisit, para politisi Amerika Serikat disebabkan alasan elektoral, tidak akan mengatasi tantangan besar ini.

Bermain-main, sementara 'Roma terbakar', keborosan dan kepengecutan mereka tidak kenal batas. Menurut the Congressional Budget office (CBO) satu-satunya ancaman terbesar bagi kestabilan anggaran adalah pertumbuhan belanja federal pada perawatan kesehatan - didorong naik baik oleh peningkatan penerima Medicare dan Medicaid (karena populasi yang menua) maupun oleh pertumbuhan dalam belanja tiap penerima yang melampaui pertumbuhan dalam GDP per capita. Hari ini, pengeluaran untuk Medicaid dan Medicare digabung (termasuk penerimaan yang mengurangi) setara dengan sekitar 5.5% GDP. Tanpa perubahan kebijakan fiskal federal - melibatkan beberapa kombinasi pengurangan belanja dan peningkatan pendapatan (pajak-pajak) daripada jumlah yang diproyeksikan di bawah hukum saat ini - kos-kos meningkat itu akan dengan cepat mendorong ukuran utang federal yang ditanggung oleh publik.

j. Kejahatan / Kriminalitas Amerika Serikat melihat dirinya sendiri sebagai pemimpin dunia bebas. Namun ia memang memimpin dunia dalam satu kategori statistik yang sangat malang - kejahatan. Terdapat hampir 12 juta kejahatan / kriminalitas dilaporkan dilakukan di Amerika Serikat setiap tahunnya. Terdapat lebih dari 2.2 juta orang di penjara di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki 5% populasi dunia, tapi 25% populasi tahanan dunia. Amerika Serikat juga mempunyai jumlah 100.000 pemerkosaan setiap tahun. Terdapat sekitar 500.000 perampokan di Amerika Serikat setiap tahunnya. Terdapat sekitar 1 juta aparat polisi di Amerika Serikat - jumlah yang paling tinggi di dunia. Terdapat lebih dari 17.000 pembunuhan di Amerika Serikat setiap tahun. Terdapat lebih dari 1.2 juta pencurian mobil di Amerika Serikat setiap tahun - sejauh ini yang tertinggi di dunia. 1 dari tiap 5 orang adalah seorang korban suatu kejahatan / kriminalitas setiap tahun di Amerika Serikat.

k. Kerusakan demokratis di dunia Kegagalan Amerika untuk mengurus mayoritas luas warga negaranya sendiri di rumah dicerminkan oleh pembahagiaannya terhadap para diktator seantero globe. Dari para diktator sayap kanan di Amerika Latin hingga tangan besi Afrika, para monarki keturunan di Timur Tengah dan para tiran brutal di Asia Tenggara, rekor Amerika Serikat mendukung beberapa pemimpin terburuk dunia tak tertandingi. Sekarang setelah Abu Ghraib, extraordinary rendition - pengiriman tahanan untuk disiksa di negara diktatorial, penyiksaan dan Guantanamo, AS telah mengkonfirmasi bahwa apapun yang bisa dilakukan para diktator bonekanya dalam hal kebrutalan bisa ditandingi olehnya.

Inggris

Retorika

Inggris menampilkan dirinya sebagai demokrasi maju di dunia. Dengan populasi 60 juta orang, ia memiliki salah satu populasi terbesar di Eropa. Parlemen Inggris secara historis disebut sebagai 'Ibu semua Parlemen'. Meskipun Inggris tidak

punya konstitusi tertulis ia punya sejarah kuat untuk hak-hak demokratis muncul sedari Magna Carta pada abad ke-13. Inggris memiliki tradisi kebanggaan aturan-aturan dan pemerintahan demokrasi.

Kenyataan

a. Kolonialisme Meski ia mempunyai sertifikat demokratis di rumah, Inggris tidak membolehkan itu menghalanginya dari mengkolonisasi seluruh dunia. Tidak hanya Inggris memperkosa sumberdaya dari Afrika, India, Timur Tengah dan Amerika Utara, ia meninggalkan jejak adu dan kuasai kapanpun ia meninggalkan koloni-koloninya. India, Irlandia, Cyprus dan Palestina adalah hanya beberapa area yang sengaja ditinggalkannya terpecah demi kepentingan-kepentingan nasional Inggris menyebabkan kesengsaraan ratusan juta manusia.

b. Skandal Politik Inggris mungkin punya Ibu segala Parlemen setelah berbagai skandal baru-baru ini menunjukkan ia mempunyai reputasi untuk Ibu semua Klaim Pembelanjaan - Expense Claims. Meski Inggris tidak memiliki penyakit yang sama kampanye pemilihan yang panjang yang dialami Amerika Serikat dan kebutuhan untuk menggalang miliaran dolar kampanye, para politisi di sisi Atlantik ini masih harus menikmati jatah berbagai skandal finansial. Ratusan MP telah ketahuan dalam skandal pembelanjaan yang telah mewabahi politik Inggris dan menodai reputasi Parlemen. Tapi skandal pembelanjaan hanyalah puncak dari berbagai skandal finansial yang telah memukul politik Inggris di tahun-tahun akhir. Para politisi telah ketahuan mencari uang untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan parlementer dan telah tertangkap basah di kamera mencari uang untuk melobi. Memang satu mantan menteri kabinet secara luar biasa mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai "taksi untuk disewa" - yang bisa dideskripsikan sebagai metafora yang tepat bagi umumnya politisi sebagaimana dipraktekkan di seluruh demokrasi di seantero dunia.

c. Defisit-Defisit Demokrasi Sistem politik Inggris meskipun mengklaim sebagai demokratis memiliki sejumlah defisit. Kepala negara dan dewan legislatif kedua - second legislative chamber (House of Lords) tidak dipilih, bahkan tidak juga Inggris mempunyai kekuatan untuk memilih Perdana Menteri mereka melalui suatu voting langsung. Faktanya satu-satunya orang yang divoting oleh warga negara rata-rata Inggris adalah MP konstituensi mereka (elektorat anggota Parlemen Inggris). Rakyat Inggris bisa voting atas siapa yang memenangkan kontes-kontes siaran langsung TV hiburan tapi tidak punya hak apapun untuk voting kepala negara mereka atau kepala pemerintahan atau bahkan siapa yang mengepalai dewan lokal mereka. Sistem penempatan pertama Inggris dahulu juga menghasilkan hasil-hasil kacau. Partai Buruh menduduki kekuasaan pada 1997, 2001 dan 2005 dengan mayoritas luas parlemen, namun dengan mandat kurang dari seperempat elektorat yang bisa saja voting di pemilihan-pemilihan itu. Adalah tidak mengherankan mengapa terdapat

kekhawatiran yang konsisten tentang rendahnya partisipasi elektoral.

d. Kemiskinan Meskipun berbagai usaha oleh para politisi Inggris untuk menampilkan keseluruhan Inggris sebagai memukau, kemiskinan parah eksis. Lebih dari 1/5 rumah tangga Inggris hidup di bawah garis kemiskinan dengan 17% percaya bahwa mereka hidup dalam kemiskinan absolut, yang adalah memalukan mengingat kekayaan yang dinikmati oleh banyak warga negara paling kaya mereka. Hampir 3.5 juta anak-anak terwabahi oleh kemiskinan, para orangtua mereka terlalu miskin untuk memberi makan, pakaian atau tempat tinggal secara layak.

e. Kesenjangan Kekayaan Kesenjangan juga menjijikan. CEO Inggris rata-rata memperoleh 81 kali gaji rata-rata pekerja rata-rata dan 10 persen populasi yang paling kaya lebih dari 100 kali lebih kaya daripada 10 persen yang termiskin, dengan kesenjangan penghasilan mencapai titik tertinggi sejak akhir Perang Dunia Kedua. 1% orang Inggris terkaya memiliki kekayaan rata-rata lebih dari 2.6 juta poundsterling sedangkan 10% terendah memiliki kekayaan rata-rata 8.800 poundsterling.

f. Kebijakan Luar Negeri Tidak Etis Kebijakan luar negeri Inggris seperti Amerika tidak memiliki masalah dengan menggandengkan diri dengan beberapa pemimpin paling brutal dunia. Pengaruh Inggris seantero dunia telah menggiringnya pada seabrek jumlah aliansi mengerikan demikian juga membuat sejumlah perjanjian busuk seantero dunia. Persekutuan Inggris dalam perang Teluk sebagai contoh telah membeli miliaran dollar perangkat keras militer dari para kontraktor pertahanan Inggris sehingga menjamin puluhan ribu pekerjaan di Inggris dengan tidak ada kegunaan terukur untuk warga negara mereka sendiri. Penghentian investigasi oleh Tony Blair atas kontrak-kontrak Angkatan Udara Inggris dengan Arab Saudi hanyalah satu contoh dari sekian banyak standar ganda Inggris di kancah dunia. Luar biasa untuk prinsip-prinsip akuntabilitas demokrasi, aturan hukum dan politik transparan.

India

Retorika

India menampilkan dirinya sendiri sebagai demokrasi terbesar di dunia. Dengan populasi 1.1 miliar orang ia adalah populasi terbesar kedua di dunia. Dalam dekade terakhir pertumbuhan perekonomian India telah tinggi dengan sektor spesifik seperti IT dan industri film sekarang tersohor sedunia. Banyak pebisnis India telah membeli perusahaan-perusahaan asing dan telah menjadi konglomerat-konglomerat besar seperti Ambani, Mittal dan Tata. Pandangan umum seantero dunia adalah bahwa India sedang booming.

Realita

a. Korupsi India mungkin memang demokrasi terbesar tapi ia juga satu yang paling korup. Politik India diinfeksi dengan nepotisme, sogok-menyogok, kriminalitas terorganisasi dan suap-menyuap. Setelah pemilihan umum 2009 berbagai kelompok yang mengerjakan reformasi elektoral menilai bahwa 153 MP (29% dari semua MP) yang terpilih dalam parlemen India menghadapi beberapa jenis tuntutan kriminal dengan 74 menghadapi tuntutan-tuntutan kriminal serius termasuk berbagai pembunuhan dan perang geng.

b. Kemiskinan Meski berbagai usaha oleh para politisi India untuk menampilkan keseluruhan India sebagai memukau, hampir 75% atau 828 juta populasi India hidup dengan kurang dari 2 dollar sehari. Sebagai prosentase ini mengungguli Sub Sahara Afrika dan hampir 2 kalinya China non-demokrasi. Lebih dari 42 juta orang India hidup di daerah kumuh yang mana 45%-nya tidak punya akses atas fasilitas-fasilitas sanitasi tertingkatkan. Lebih dari 1/2 orang di dunia yang harus BAB (buang air besar) di tempat terbuka, hidup di India. 1/4 kematian bayi baru lahir di dunia terjadi di India. Sekitar 5 juta orang India mati karena penyakit kardiovasikular (jantung dan pembuluh darah) setiap tahun dan 2 juta mati karena meminum air terkontaminasi. 1 anak mati karena suatu penyakit yang bisa dicegah setiap 15 detik. 1 Wanita mati dalam melahirkan setiap 5 menit. Meski kekuatan besar dan kewirausahaan kewarganegaraan India, para politisi demokrasi India telah mengecewakan rakyat India.

c. Ketimpangan Jender Para wanita terepresentasi secara disproporsional di antara kaum miskin India: 1/2 dari mereka tidak bisa membaca. Preferensi atas anak laki-laki, pembunuhan bayi dan pengabaian anak-anak perempuan adalah di mana-mana. Dalam beberapa bagian negara itu terdapat hanya 850 anak perempuan untuk tiap 1.000 anak laki-laki.

d. Tingkat Melek Baca Rendah Meski berbagai kemajuan India dalam teknologi informasi dan telekomunikasi global, 1/3 populasinya tetap buta huruf dan hanya 15% anak-anak mencapai Sekolah Menengah Atas dan hanya 7% lulus. 25% posisi mengajar seantero negara kosong, dan 57% professor kekurangan baik master maupun Ph.D., menurut laporan regulasi baru-baru ini. Meskipun berbagai universitas India memproduksi 3 juta lulusan setiap tahun, hanya 15% dari mereka adalah karyawan tepat untuk perusahaan-perusahaan blue-chip (teknologi).

e. Kesenjangan Kekayaan Ketimpangan kekayaan juga meningkat. Berbagai diagram menunjukkan sekarang terdapat 52 milyuner di India,

dibandingkan dengan 27 di tahun lalu. Selama berjalannya tahun itu, pasar saham telah memperoleh lebih dari 75% dan perekonomian telah tumbuh hampir 7%, menggelontorkan miliaran dolar ke dalam rekening-rekening bank orang-orang terkaya India. Namun demikian 0.00001% populasi India sekarang merupakan sekitar 1/4 miliaran-dollar produk domestik brutonya.

Afghanistan

Retorika

Barat menampilkan dirinya sendiri sebagai telah membeli demokrasi kepada Afghanistan. Dengan populasi sekitar 28 juta orang, Barat menggemborkan bahwa kekalahan Taliban pada akhirnya telah membeli demokrasi pada dunia Muslim. Meskipun terdapat tumbuhnya perkara-perkara tak terhindarkan, Afghanistan diyakini berada di atas jalan panjang untuk menjadi sebuah demokrasi matang dan mengambil satu kursi di meja komunitas internasional.

Realitas

a. Demokrasi di bawah penjajahan Barat menganggap Afghanistan yang terjajah suatu demokrasi, meskipun ia baru saja punya satu pemilihan umum presidensial yang terburuk yang pernah disaksikan, dengan bukti jelas manipulasi suara dan kecurangan elektoral. Bagaimana ia bisa diklaim bahwa ia adalah negara independen ketika otoritas signifikan untuk berbagai keputusan nasional ada di tangan kekuatan tidak terpilih - seperti Amerika Serikat, yang akan memiliki hampir 100.000 pasukan di seantero negara itu?

b. Kemiskinan Meskipun berbagai usaha oleh para politisi Barat untuk menampilkan negara itu sedang meningkat, kemiskinan adalah endemik dan pembangunan adalah timpang setidak-tidaknya. Menurut PBB, Afghanistan peringkat ke-174 dari 178 negara pada Human Development Index, suatu peringkat yang mencampurkan pendapatan per capita dengan statistik kesehatan publik, tingkat kejahatan dan indikator-indikator lainnya. Dari setiap 1.000 bayi yang lahir di Afghanistan, 142 mati sebelum mencapai ulang tahun mereka yang pertama. 1 wanita mati dalam kehamilan setiap 30 menit. Usia harapan hidup keseluruhan diestimasi pada 42 tahun. Afghanistan memiliki tingkat mortalitas maternal tertinggi kedua di dunia dan tingkat ketiga terburuk mortalitas anak-anak. Hanya 23% dari populasi yang mempunyai akses pada air layak minum, dan hanya 24% dari populasi di atas usia 15 yang bisa membaca dan menulis, dengan

tingkat melek baca lebih rendah di antara populasi para wanita dan nomaden. Lebih dari 1/2 populasi memperoleh kurang dari 2 dolar sehari.

c. Korupsi Dalam laporan 2009, Transparency International me-rating Afghanistan sebagai negara yang paling korup di dunia, dengan korupsi sektor publik makin parah untuk tahun kedua berikutnya. Hanya Somalia yang tercabik perang yang rating-nya lebih buruk pada Corruption Perceptions Index (CPI) organisasi berbasis-Berlin dari 180 negara. Satu survei 2008 oleh Integrity Watch Afghanistan menemukan bahwa satu rumah tangga tipikal membayar sekitar 100 dollar setahun dalam sogokan di negara di mana lebih dari 1/2 populasi bertahan dengan kurang dari 1 dolar sehari.

d. Opresi dan Tirani negara Sementara London dan Washington menyemburkan retorika mengenai good governance dan hak-hak manusia, rezim klien mereka di Kabul terus membentuk hubungan-hubungan dengan para penjahat perang - warlords - penguasa militer diktatorial. Abdul Rashid Dostum seorang mantan penguasa perang yang terkenal, menyokong kampanye pemilihan Karzai dan akhir-akhir ini kembali ke Afghanistan dari Turki. Dia dituduh mendalangi kematian para tahanan Taliban hingga 2.000 orang selama invasi 2001. 2 wakil presiden Karzai, Mohammad Qasim Fahim dan Karim Khalili, adalah juga mantan diktator perang tertuduh berbagai pelanggaran hak-hak manusia.

e. Peningkatan produksi narkoba Meski 8 tahun penjajahan, tidak ada yang bisa menghambat arus narkoba dari Afghanistan. Di 2008 pemerintah Afghan berhasil dalam menghancurkan hanya 3.5% dari 157.000 hektar poppy - tumbuhan opium Afghanistan karena para tim pembasmi diserang atau disuap oleh para juragan narkoba. Pada Desember 2009, Viktor Ivanov, kepala agensi federal anti-narkoba Russia menuduh para pasukan Inggris di Propinsi Helmand tidak melakukan cukup untuk menghentikan produksi heroin. Dia mengatakan bahwa, "60% semua opiates - narkoba beropium di dunia diproduksi di area yang ditanggungjawab oleh pasukan Inggris ... Terdapat 25 hektar opium di 2004. Sekarang ada 90.000. Ini menunjukkan padamu seberapa efektif mereka". Kesengsaraan dan penyakit kecanduan narkoba adalah masalah yang bertumbuh. Penghancuran lahan telah gagal dan para kartel kriminal menyebar melalui Iran, Rusia dan Asia Tengah.

f. Hubungan-hubungan narkoba hingga puncak Terdapat bukti luas bahwa para penguasa disokong Barat di Afghanistan terlibat dalam aksi ilegal perdagangan narkoba. Pada Oktober 2009, the New York Times melaporkan bahwa saudara dari Hamid Karzai, Ahmed Wali Karzai, sedang dibayar oleh CIA dan adalah seorang tersangka pemain dalam perdagangan subur opium Afghanistan.

g. Kemerosotan pembangunan "pembangunan-kembali" Afghanistan adalah lebih kecurangan daripada kegagalan. 1/2 Kabul dalam kondisi hancur, banyak orang masih tinggal di dalam tenda, ribuan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, anak-anak kelaparan, sekolah-sekolah terjejal dan rumah sakit kotor, para wanita mengemis di jalanan dan beralih menjadi ke prostitusi, dan anak-anak diculik dan dijual ke perbudakan atau dibunuh untuk diambil organ-organ mereka. Sejak 2001, Kongres Amerika Serikat telah menyediakan lebih dari 39 miliar dollar dalam asistensi kemanusiaan dan rekonstruksi untuk Afghanistan, menurut suatu laporan oleh U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. Militer AS membelanjakan 100 juta dolar sehari, sementara 7 juta dollar mengalir ke pembangunan, dan 40% dari 7 juta dolar itu hilang ke biaya-biaya administratif. Jadi hanya sekitar 4 juta dollar mengalir ke komunitas. Dari 4 juta dollar itu, kurang dari 5% mengalir ke pembangunan pertanian, padahal 80% populasi bergantung pada pertanian untuk penghidupan mereka.

h. Dana Siluman dan Curang Para pemimpin Barat terus mengadakan pertemuan ke pertemuan dan menjanjikan milyaran dalam bantuan ke Afghanistan. Rakyat Afghanistan berhak menanyakan "ke mana semua bantuan ini pergi?" Sementara jawaban resmi adalah "korupsi", banyak laporan yang menyatakan bahwa hanya sebagian dari bantuan - mungkin 40% - adalah "bantuan yang sesungguhnya". Sisanya adalah "dana siluman" yang tidak pernah bahkan muncul di negara penerima. Beberapa negara menghitung peringanan utang atau biaya-biaya konstruksi berbagai kantor kedutaan sebagai dana bantuan. Banyak dari uang itu tidak pernah meninggalkan bank-bank Barat karena dibayarkan langsung kepada "para ahli" Barat. Banyak dari uang itu punya tali pengikat, mewajibkan si penerima untuk menggunakan uang itu untuk membeli produk-produk dari negara donor, bahkan ketika produk-produk yang sama lebih murah di rumah. Banyak dari dana bantuan itu mengalir ke perusahaan-perusahaan yang kemudian men-subkontrak-kan hingga sebanyak 5 kali dengan tiap subkontraktor untuk mendapatkan keuntungan antara 10% dan 20% atau lebih sebelum ada pekerjaan yang diselesaikan pada proyek. Donor terbesar di Afghanistan adalah AS, yang departemen dana bantuan luar negerinya USAID mengalirkan hampir 1/2 anggaran bantuan untuk Afghanistannya kepada 5 kontraktor terbesar AS. Seantero Afghanistan terdapat cerita-cerita jembatan-jembatan setengah jadi, jalan-jalan yang mengarah ke antah-berantah dan rumah-rumah sakit yang terancam kolaps dalam badai berat pertama, terutama karena para kontraktor tidak jujur yang mengurangi jumlah material atau pekerjaan. Banyak dari mereka adalah para mantan oportunist perang yang menggunakan koneksi-koneksi mereka dengan rezim untuk memperoleh kontrak-kontrak basah. Terdapat sangat sedikit pembangunan ekonomi atau industri selain narkoba.

Bab 3 Tanya Jawab Mengenai Sistem Khilafah Islam

O People, I have been appointed over you, though I am not the best among you. If I do well, then help me. And if I act wrongly, then correct me. Truthfulness is synonymous with fulfilling trust, and lying is tantamount to treachery. The weak among you is deemed foremost by me, until I return to them that which is rightfully theirs, Insha'Allah. And the strong among you is deemed furthestmost by me until I take from them what is rightfully someone else's, Insha'Allah. No group of people abandons Jihad in the path of Allah, except that Allah makes them suffer humiliation. And wickedness does not become widespread among a people, except that Allah inflicts them with widespread calamity. If I disobey Allah and His Messenger, then I have no right to your obedience. Stand up now to pray, may Allah have mercy on you

The first Caliph of Islam, Abu Bakr, in his inaugural address

Wahai rakyat, aku telah dipilih atas kalian, meskipun aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku bertindak baik, maka bantulah aku. Dan jika aku bertindak salah, maka koreksilah aku. Kebenaran berarti adalah memenuhi amanah, dan berbohong adalah seburuk-buruknya pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian adalah yang terdepan bagiku, hingga aku menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, Insya Allah. Dan yang terkuat di antara kalian adalah yang paling akhir bagiku hingga aku mengambil dari mereka apa yang menjadi hak orang lainnya, Insya Allah. Tidak ada suatu kaum yang meninggalkan Jihad di jalan Allah, kecuali Allah membuat mereka menderita kehinaan. Dan kejahatan tidaklah menyebar di antara suatu kaum, kecuali Allah menimpakan bencana luas atas mereka. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya Saw., maka aku tidak punya hak atas kepatuhan kalian. Berdirilah sekarang untuk sholat, semoga Allah merahmati kalian.

Khalifah Islam pertama, Abu Bakar, dalam ceramah penobatannya

Dalam Bab 1 kita menyatakan bahwa yang berikut ini adalah 7 prinsip kunci sistem politik apapun bagi masyarakat sipil manapun dan menyimpulkan bahwa negara-negara sekular demokrasi tidak dapat memenuhinya.

1. Para pemimpin dalam masyarakat manapun harus dipilih dan ditetapkan akuntabel atas semua aksi mereka.
2. Partai-partai politik yang mematuhi konstitusi harus diperbolehkan bekerja di dalam sistem.
3. Para pemimpin politik harus merepresentasi kepentingan-kepentingan semua rakyat bukannya hanya elit sempit.
4. Harus terdapat pengadilan yang independen dari eksekutif, yang bisa meminta pertanggung jawaban eksekutif.
5. Warga negara dari setiap keyakinan, ras atau jender - tidak-cacat atau cacat - harus memiliki hak-hak yang sama di bawah negara.
6. Tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum
7. Penangkapan, penahanan tanpa alasan, penyiksaan dan penyerahan tahanan untuk disiksa di negara lain harus dilarang sepenuhnya.

Pertanyaan Para pemimpin dalam masyarakat manapun harus dipilih dan ditetapkan akuntabel atas semua aksi mereka.
Apakah demikian di dalam Masyarakat Islam?

Jawaban Ya demikianlah, berkebalikan dengan pemahaman Khilafah Islam sebagai kediktatoran religius memerintah atas sistem otoritarian, kepala negara adalah dipilih di dalam pemilihan transparan terbuka dan secara langsung akuntabel atas semua tindakannya pada rakyat. Akuntabilitas ini dijaga dengan adanya masyarakat terbuka dan partai-partai politik yang cerdas, adanya institusi-institusi kuat termasuk pengadilan independen juga adanya nilai-nilai yang kuat. Terdapat banyak bukti Islami yang masyhur yang mewajibkan menyuruh yang makruf dan melarang yang munkar (amr bil maaruf wa nahi anil munkar) atas penguasa.

Di dalam Negara Khilafah terdapat institusi spesifik yang disebut Mahkamah Kezaliman (Mahkamut ul Madhalim), yang memiliki kekuatan wajib untuk memperhatikan komplain apapun terhadap Kepala Negara, para penasihatnya, asisten-asistennya atau para gubernurnya di propinsi. Memang mahkamah itu sendiri memiliki hak untuk memeriksa kasus apapun ketidakadilan oleh eksekutif bahkan jika tidak ada yang mengajukan komplain. Mengenai hal ini Hizbut-Tahrir menyatakan dalam bukunya *'The Institutions of State in the Khilafah'* [2005]: *'Hakim Madhalim adalah hakim yang ditunjuk untuk menghapus setiap Madhlimah (kezaliman) yang dilakukan oleh Negara terhadap siapapun, baik orang ini penduduk Negara maupun orang yang tinggal di bawah otoritasnya, dan baik Madhlimah ini dilakukan oleh Khalifah maupun mereka yang bekerja di bawahnya, baik mereka penguasa maupun pegawai sipil... Asal mahkamah Madhalim adalah diturunkan dari laporan-laporan mengenai Rasulullah Saw. di mana beliau mendeskripsikan tindakan-tindakan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang memerintah atas rakyat dengan tindakan Madhlimah. Anas memberitakan: "Harga-harga meninggi di masa Rasulullah Saw. sehingga mereka berkata kepadanya: 'Ya Rasulullah mengapa engkau tidak menetapkan harga?' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta, Yang Maha Mewarisi, Yang Meluaskan Rezeki, Yang Maha Memberi, dan Yang Memberi Harga, dan aku berharap akan bertemu Allah Swt. tanpa membuat ada seseorang menuduhku melakukan Madhlimah terhadapnya baik dalam darah maupun uang.'" Ini diberitakan oleh Ahmad [Lihat Musnad, 3/286]. Beliau Saw. oleh karenanya menetapkan bahwa menentukan harga adalah Madhlimah, karena jika beliau melakukannya, yaitu menetapkan harga, berarti beliau bertindak tanpa otoritas. Beliau Saw. juga menjadikan masalah hisbah, yaitu keputusan hukum syariah yang bersifat mengikat yang mempengaruhi hak-hak umum yang diatur oleh Negara bagi masyarakat, sebagai bagian dari peradilan Madhalim.'*

Pertanyaan Jelaskan secara singkat dogma-dogma kunci sistem politik Islam

Jawaban Sistem politik Islam memiliki sejumlah prinsip kunci, 2 yang fundamental adalah bahwa:

1. Legislasi adalah dihasilkan dari sumber-sumber ketuhanan yaitu Qur'an dan Sunnah, Ijmaa as- Sahaba (Konsensus para Sahabat Nabi Saw.) dan Qiyas (Logika analogis)
2. Otoritas ada pada rakyat.

Prinsip yang pertama menihilkan dogma kunci demokrasi sekular, sedangkan prinsip kedua menggilas fitur-fitur kunci kediktatoran.

Pertanyaan Apa yang kamu maksud dengan 'otoritas adalah milik rakyat'?

Jawaban Ini berarti bahwa rakyat adalah pihak yang memegang otoritas pemerintahan dan mereka mengikat perjanjian dengan penguasa (Khalifah) untuk memerintah menurut Qur'an dan Sunnah. Kontrak itu atau bai'at mensyaratkan bahwa penguasa diperbolehkan memerintah rakyat selama dia memerintah menurut Qur'an dan Sunnah. Pengangkatan penguasa oleh karenanya melalui kehendak popular dari rakyat melalui proses elektoral.

Seorang penguasa harus memiliki mandat dari populasi atau jika tidak maka dianggap tidak memiliki legitimasi / tidak sah. Ini sepenuhnya mengubur mitos bahwa Negara Khilafah akan menjadi semacam kediktatoran religius yang ditimpakan atas rakyat melalui dekrit religius. Hizbut Tahrir menyebutkan dalam 'Institutions of State in the Khilafah': *'Khalifah (Caliph) adalah laki-laki yang merepresentasi Ummat dalam pemerintahan, otoritas dan dalam pengimplementasian hukum-hukum Ketuhanan (Syariah). Islam telah menyatakan bahwa pemerintahan dan otoritas milik Umat. Maka bagi Ummat untuk menunjuk individu untuk mengatur otoritas itu dan menerapkan hukum-hukum ketuhanan mewakili mereka.'*

Pertanyaan Orang bilang ini akan menjadi suatu pemilihan umum yang merupakan 'satu-orang satu-voting satu-waktu'

Jawaban Tidaklah terdapat batasan waktu tetap bagi seorang pemimpin. Mahkamah Madzalim bisa menyingkirkan dia kapanpun, jika dia melanggar kontrak konstitusional pemerintahan atau menentang kondisi persyaratan apapun untuk memerintah. Tidaklah dibutuhkan waktu untuk menunggu 5 tahun untuk pemilihan umum berikutnya untuk melakukan ini. Prinsip ini berakar dari hukum ketuhanan tapi bisa dilihat sebagai menyediakan keberlanjutan jangka panjang juga menghindari kompromi-kompromi dan ketergantungan atas uang yang dibawa oleh siklus elektoral pendek di dalam demokrasi modern. ([Lihat Bab 2](#))

Pertanyaan Tapi tanpa batasan periode, bukankah ini hanya menjadi suatu kediktatoran terpilih?

Jawaban Tidak, seorang pemimpin jika dia menentang batasan-batasan konstitusional atau melakukan tindakan-tindakan nyata buruk dia bisa dicopot oleh Mahkamah Madzalim di saat apapun. Mahkamah ini adalah independen dari eksekutif dan bisa memperhatikan komplain apapun. Selain itu akuntabilitas - oleh para warga negara biasa, partai-partai politik, media independen dan dewan umat adalah kewajiban konstan atas rakyat - tidak hanya untuk dilakukan sekali setiap 4 atau 5 tahun melalui kotak suara.

Pertanyaan Selain dari kepala Negara adakah institusi-institusi terpilih lain?

Jawaban Ya ada. Terdapat dewan lokal yang dipilih secara langsung dan yang batasan periodenya adalah 5 tahun dan yang para wakilnya kemudian memilih dari antara mereka sendiri dewan nasional yang dikenal sebagai Dewan Ummat (atau Majlis al-Ummah).

Pertanyaan Apa kekuatan-kekuatan dewan-dewan itu?

Jawaban Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi Kepala Negara di tingkat nasional dan mengawasi para Gubernur yang ditetapkan (oleh Khalifah) di tingkat lokal. Selain itu pandangan-pandangan / keputusan-keputusan mereka atas perkara-perkara kepentingan publik umum adalah dipandang mengikat.

Allah berfirman dalam Qur'an: *'dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah'* [Terjemah Makna Qur'an Surat (3) ali-Imran:159].

Dewan lokal juga bisa secara mayoritas voting untuk mencopot Gubernur yang telah ditetapkan dengan menyatakan voting ketidakpercayaan. Buku *'The Ruling System in Islam'* oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir menggarisbawahi bahwa salah satu mandat kekuatan Dewan Umat adalah: *'... hak untuk meminta pertanggungjawaban penguasa terhadap semua hal yang terjadi di dalam negara, baik itu berkaitan dengan urusan domestik, urusan luar negeri, urusan finansial atau militer.'*

Pertanyaan Jika legislasi adalah ketuhanan asalnya, tidakkah ini membuat Negara Islam suatu teokrasi seperti Iran atau Arab saudi?

Jawaban Tidak! Teokrasi pada hatinya percaya bahwa terdapat suatu kelompok atau para pemimpin yang tak mungkin salah dan yang memiliki hak eksklusif untuk menginterpretasi kalimat Tuhan, di mana tidak ada yang dibolehkan menantang interpretasi mereka dan siapapun yang melakukannya dihukum. Kaum Muslimin percaya bahwa para Nabi adalah dipilih oleh Tuhan tetapi para

pemimpin politik setelahnya tidak. Legitimasi mereka harus muncul dari otoritas rakyat. Sistem politik Islam bukanlah teokrasi sifatnya dengan siapapun diperbolehkan menantang pemerintahan oleh baik para ulama atau kepala negara. Kita juga tidak menerima Iran atau Arab Saudi sebagai model yang valid; yang pertama (Iran) memiliki model pisah religius-sekular, tidak Islam tidak juga demokrasi; sementara yang kedua (Arab Saudi) adalah monarki keturunan yang menggunakan bangunan religius sebagai alat untuk mengendalikan oposisi atas agenda kapitalis dan pro-Barat mereka.

Pertanyaan Kamu mengatakan partai-partai politik yang mematuhi konstitusi harus beroperasi secara bebas di dalam sistem. Tapi jika kamu percaya kamu bukanlah teokratis, tentunya negaramu adalah religius dan oleh karenanya tidak pluralistik?

Jawaban Seperti kebanyakan negara, negara Islam memiliki konstitusi tertulis yang mengatur masyarakat dan oleh karena itu membolehkan para individu dan partai-partai politik untuk beroperasi di dalam konstruk konstitusional. Tentu konstitusi Islam berbeda dengan konstitusi yang dipromosikan kapitalisme pasar-bebas dan liberalisme sosial. Namun konstitusi, ditulis atau diterapkan, dalam negara-negara demokrasi juga membatasi para individu dan partai-partai untuk memastikan bahwa semua orang beroperasi di dalam aturan-aturan dan sistem politik yang sama. Sistem Islam dalam pengertian ini tidak ada bedanya. Ini ditetapkan dalam artikel 21 draft konstitusi Hizbut Tahrir yang diturunkan dari sumber-sumber Islam.

Pertanyaan Tapi bukankah rakyat di Barat bebas untuk mengkritik para pemimpin mereka dan sistem-sistem politik mereka?

Jawaban Hingga tingkat tertentu, meski sejak 9-11 kita melihat ketidak-toleransian rakyat yang lebih besar yang menantang ide-ide fundamental. Di dalam sistem politik Islam, meminta tanggung jawab para pemimpin dan berbagai keputusan mereka tidak hanya didorong - itu adalah kewajiban.

Allah berfirman di dalam Quran: *'Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.'* [Terjemah Makna Qur'an Surat (3) al-Imran: 104] - yang berarti bahwa harus terdapat di setiap waktu kelompok-kelompok di dalam Ummat yang mengawasi penguasa. Kita juga mengetahui bahwa sejarah Islam memiliki catatan panjang mengawasi para penguasa, debat dan diskusi, dan Islam menggariskan pembedaan yang jelas antara debat, kritik otoritas di satu sisi dan penyimpangan keyakinan-keyakinan kunci yang tak berguna - tidak seperti posisi Eropa selama penyimpangan kartun-kartun Denmark.

Pertanyaan Bagaimana ini bisa sejalan dengan 'media bebas'?

Jawaban Media di dalam Negara Khilafah adalah independen, secara umum tidak memerlukan izin apapun untuk bekerja. Setiap warga negara dalam Negara Khilafah dibolehkan mendirikan operasi media apapun sesuai berbagai petunjuk umum bersama hukum-hukum - yang mencegah serangan-serangan berbahaya, mempromosikan bentuk apapun kehinaan seksual, rasisme atau isu-isu berkaitan dengan keamanan nasional. Tapi meneliti kebijakan, mempertanyakan dan mengawasi eksekutif dan cabang-cabang lain pemerintah adalah sepenuhnya berada dalam cara aksi mereka.

Pertanyaan Jika legislasi disumberkan dari hukum ketuhanan, bagaimana kamu bisa maju dan memecahkan tantangan-tantangan dan masalah-masalah baru?

Jawaban syariat Islam memiliki solusi-solusi detail dan prinsip-prinsip kunci yang diturunkan dari Quran dan Sunnah yang tak termakan waktu. Itu bisa diaplikasikan pada setiap tantangan atau masalah baru. Ini terbangun dengan kokoh dalam syariat Islam di bawah disiplin Ijtihad. Kebanyakan negara demokrasi masih mengutip Magna Carta di 1215 dan Amerika Serikat didasarkan pada suatu konstitusi yang ditulis tahun 1776. Selain itu perjanjian atau konvensi pan-nasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak-Hak Manusia - European Convention on Human Rights atau Konvensi Geneva - Geneva Conventions juga dilihat oleh para suporternya sebagai kesepakatan yang berlaku selamanya.

Terlebih lagi jika seseorang mempelajari sejarah Islam dapat melihat bagaimana selama Khilafah Islam dunia Muslim ada di garis depan sains, teknologi dan kemajuan.

Pertanyaan Kamu menyatakan bahwa para pemimpin harus merepresentasi kepentingan-kepentingan semua rakyat, tidak hanya elit sempit. Kamu jelas-jelas kritis tentang kedekatan berbagai bisnis besar dalam masyarakat demokrasi, tapi bagaimana kamu akan menghentikan itu dari terjadi di Negara Khilafah?

Jawaban Persekutuan uang dan politik Barat telah mengakibatkan masalah-masalah besar dalam menghasilkan korupsi, degenerasi nilai-nilai masyarakat dan ketidakstabilan dalam kedamaian dan keamanan global seiring sumber-sumberdaya seluruh dunia secara konstan diperebutkan. Sistem Islam akan mengusir uang keluar dari politik modern. Sirkus elektoral setiap 4 atau 5 tahun (setiap 2 tahun bagi House of Representatives di Amerika Serikat) di Barat secara positif mendorong pertumbuhan uang dalam politik memaksa para politisi untuk menggalang sejumlah menjijikkan dana untuk pemilihan-kembali atau memaksimalkan kekayaan mereka sendiri sebelum mereka didepak. Sistem Islam, meskipun tidak kebal dari godaan tawaran, berusaha untuk secara aktif memisahkan keuangan dan kepentingan-kepentingan berbagai korporasi dari

politik dengan menghindari sirkus elektoral konstan. Selain itu sementara kapitalisme dan demokrasi disenyawakan di Barat, maka menghasilkan suatu kelas para politisi yang secara pribadi korup atau antek kelas korporat, tidak ada pengaruh semacam itu diperbolehkan di dalam model politik Islam di mana batasan-batasan kuat mengitari hubungan-hubungan dan pengaruh ditegakkan. Sistem ekonomi Islam juga merupakan antitesis lengkap terhadap perekonomian kapitalis, menempatkan perkara-perkara orang biasa di atas bisnis besar. Terlebih lagi, suatu catatan korupsi adalah perkara yang melanggar kondisi kontrak pemerintahan bagi Khalifah - artinya orang demikian akan tidak diperbolehkan menjabat, atau akan didepak dari jabatan sekaligus.

Pertanyaan Kamu menyatakan bahwa harus terdapat suatu pengadilan yang independen dari eksekutif dan yang akan meminta pertanggungjawaban eksekutif. Apakah kamu mengatakan pengadilan itu oleh karenanya independen dari Negara di dalam Khilafah?

Jawaban Ya, tentu saja! Para hakim dan pengadilan adalah sepenuhnya independen dari kepala negara dan eksekutif dan merupakan bagian kunci institusi negara Khilafah. Selain itu, seorang hakim yang sedang menjabat yang menginvestigasi suatu masalah berkaitan dengan eksekutif tidak bisa diberhentikan hingga penyimpulan investigasi itu.

Pertanyaan Apakah kamu oleh karenanya mengatakan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum?

Jawaban Benar. Tidak ada - termasuk kepala negara, keluarganya, atau ulama religius manapun - adalah kebal hukum. Dan tidak seperti Barat di mana keadilan dipelintir bagi mereka yang lebih kuat dan lebih kaya, pengadilan-pengadilan Islam telah secara sejarah - dan akan melakukan demikian di masa depan - menegakkan keadilan untuk yang lemah, minoritas dan kurang beruntung. Ini adalah karena sabda Nabi Saw. yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim ketika beliau dipetisi untuk mengintervensi untuk seorang wanita bangsawan yang telah melakukan pencurian: *'Negeri-negeri sebelumnya dibinasakan karena jika seorang yang terpandang melakukan pencurian, mereka membiarkannya, tapi jika seorang yang lemah di antara mereka melakukan pencurian, mereka mengegalkan hukuman atasnya. Demi Allah, jika Fatimah, putri Muhammad Saw., melakukan pencurian, Muhammad Saw. akan memotong tangannya!'*

Pertanyaan Apakah kamu mengatakan bahwa Khilafah tidak akan mendiskriminasi terhadap warga negaranya atas dasar keyakinan, ras, jenis kelamin atau kecacatan fisik? Tentu saja dengan berdasarkan Islam, kaum Muslimin akan selalu diunggulkan dan tentu saja sekularisme adalah jalan terbaik untuk ditempuh?

Jawaban Tidak ini adalah suatu tuduhan umum tapi tidak punya dasar fakta. Negara Khilafah adalah diharuskan oleh hukum ketuhanan untuk memperlakukan para warga negara non-Muslim dengan baik; melindungi hak mereka untuk keyakinan-keyakinan religius dan melindungi tempat-tempat peribadatan mereka. Artikel 5 draft konstitusi Islam Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa *'Semua warga Negara Islam menikmati hak-hak dan kewajiban-kewajiban syariah.'* Negara dilarang sama sekali dari mendiskriminasi antar individu dalam hal aturan, pengadilan dan manajemen urusan-urusan atau apapun yang mirip. Sebaliknya, setiap individu harus diperlakukan sama tanpa memandang ras, keyakinan, atau warna atau apapun yang lain. Allah Subhana wa Ta'ala berfirman *"dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* [Terjemah Makna Qur'an Surat (4) an-Nisa: 58] dan dalam firman-Nya Subhana wa Ta'ala: *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* [Terjemah Makna Qur'an Surat (5) al-Maidah: 8]. Juga Rasulullah Saw. *"Barangsiapa membunuh seorang yang dalam perjanjian (perlindungan) secara tidak adil tidak akan mencium wangi surga; yang wanginya ditemukan sejauh perjalanan seratus tahun"* [Tirmidhi].

Sepanjang sejarah para Yahudi dan Kristen dilindungi dengan baik dan contoh-contoh Spanyol Islam dan perlindungan yang diberikan kepada para Yahudi oleh Istanbul pada saat pembebasan adalah contoh-contoh terdokumentasi. Dalam satu kasus terkenal dari periode awal kekuasaan Islam seorang non-Muslim membawa kepala negara ke pengadilan atas suatu persengketaan kepemilikan dan memenangkan kasus itu. Para non-Muslim berkeyakinan apapun (atau tidak punya) tidak memiliki ketakutan dari sistem Islam dan bagi banyak pihak yang melihat masyarakat Barat semakin berkubang dalam materialisme dan korupsi politik mungkin terlihat sedikit heran terhadap model Khilafah.

Pertanyaan Kamu menyatakan pencekalan, memata-matai warga negara, penahanan, penyiksaan dan pengiriman luar biasa tahanan - arbitrary arrest, spying on citizens, internment, torture and extraordinary rendition harus sepenuhnya dilarang. Namun jika kamu tidak percaya pada hak-hak demokratis, tidakkah orang akan mengatakan itu menjadikannya suatu Negara Polisi?

Jawaban Tidak, kita tidak sepenuhnya menyangkal ini. Kita tidak percaya pada pencekalan tanpa alasan atau penyiksaan atau pengiriman tahanan untuk disiksa atau penahanan tanpa alasan. Setiap orang punya hak untuk asumsi awal tak bersalah, hak untuk privasi dan hak untuk pengadilan adil. Demokrasi sekular tidak memiliki monopoli atas menghormati hak-hak warga negara.

Dalam 'Institutions of State in the Khilafah' Hizb ut-Tahrir memberikan contoh berikut ini dari sejarah Islam mengenai Khalifah kedua Sayidina Umar (Ra): *One day news reached him about his Amil (city governor) over Homs, Umayr Ibnu Saad, who had said while over the pulpit of Homs, "Islam will remain strong as long as the authority is strong. And the strength of the authority does not come about with the killing by the sword or the lashing by the whip, but by judging with the truth and the upholding of justice." Upon hearing this 'Umar said "I wish I had a man like Umayr Ibnu Saad to help me with the Muslims' affairs."*

"Suatu hari berita sampai kepadanya mengenai Amil-nya (gubernur kota) di Umayr Ibnu Saad yang berkata ketika di mimbar kehormatan, "Islam akan tetap kuat selama pemerintahnya kuat. Dan kekuatan pemerintah tidak dilakukan dengan pembunuhan oleh pedang atau pemukulan oleh cambuk, tapi dengan mengadili dengan kebenaran dan penegakan keadilan." Mendengar ini Umar berkata "Aku berharap punya orang seperti Umayr Ibnu Saad untuk membantuku dengan urusan-urusan para Muslim."

Itu berlanjut pada menyatakan bahwa Islam melarang Negara dari memata-matai warga negaranya - sesuatu yang endemik di negeri-negeri Muslim tapi juga sedang meningkat di banyak negara barat: *Memata-matai para Muslim adalah haram sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini. Allah Swt. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, [Terjemah Makna Al-Qur'an Surat (49) Al-Hujurat : ayat 12] Ini adalah pelarangan umum memata-matai; dan ini tetap umum kecuali terdapat bukti yang rincinya. Ini dikonfirmasi oleh hadits dilaporkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dalam beritanya dari Al-Muqdad dan Abu Umamah ketika mereka berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: Jika amir mencari kecurigaan di antara rakyat dia akan menghancurkan mereka." [Abu Dawud, Sunan, #4889 dan al-Haythami, Majma' al-Zawa'id, vol.5, p.218]*

Terdapat juga dalam konstitusi jelas yang mencerminkan larangan-larangan Islam atas penyiksaan dan perilaku kejam di antara banyak hal lain - sebagaimana diterapkan pada polisi, jasa-jasa angkatan bersenjata dan keamanan, demikian juga populasi umum – sebagai perlindungan dari pemerintahan berpemaksaan semacam itu; bersama dengan artikel 13 konstitusi yang menyatakan: *Pada asalnya, seseorang adalah tidak bersalah. Tidak ada yang boleh dihukum tanpa putusan pengadilan. Adalah sepenuhnya terlarang untuk menyiksa siapapun dan siapapun yang melakukan ini akan dihukum.*

Pertanyaan Tidakkah kekuasaan religius di Eropa pada periode abad pertengahan mengekang masyarakat Barat dalam hal kemajuan material?

Jawaban Ya tapi ini adalah spesifik untuk Eropa di mana sains dipandang sebagai musuh bagi dogma-dogma yang ditetapkan oleh Gereja. Kebalikannya terjadi di dunia Muslim, Khilafah secara nyata mendorong kemajuan saintifik dan teknologi atas dasar dogma-dogma Islam. Islam tidak pernah menurunkan aturan-aturan ketuhanan berkaitan dengan perkara-perkara sains, administratif atau teknik. Berbagai pencapaian dan pengembangan signifikan Khilafah dalam sejarah telah diakui oleh banyak komentator non-Muslim, para ahli sejarah dan para ahli.

Pertanyaan Bahkan jika kamu menolak model Barat berdasarkan korupsinya dan ketidak-mampuannya untuk mengatasi berbagai tantangan jangka-panjang bukankah Cina sebuah alternatif?

Jawaban Cina mungkin punya catatan pertumbuhan ekonomi mengagumkan tapi ia adalah negara yang meremukkan individunya dan menyangkal mereka atas hak-hak politik. Bagi Cina rakyat adalah sumberdaya untuk diatur melalui pasar kapitalis bukannya dianggap manusia yang harus dihormati dan diperlakukan sebagai manusia.

Membunuh rakyat tak berdosa dengan berdarah dingin karena memprotes di lapangan publik bukanlah tanda suatu peradaban yang nyaman dengan dirinya sendiri. Kebijakan-kebijakan internal Cina di Xinjiang dan Tibet adalah keras dan parah dan dikarakterisasi oleh sikap paranoid dan persyaratan untuk kepatuhan mutlak. Cina sering menuduh Barat atas terlibat dalam perilaku brutal, namun perlakuannya atas orang-orang Uighur menunjukkan ketidak-mampuannya untuk membangun masyarakat yang bisa menarik bagi minoritas.

Meskipun usaha-usaha oleh para politisi Cina untuk menampilkan keseluruhan Cina sebagai memukau, hampir 40% atau 500 juta populasi Cina hidup dengan kurang dari 2 dollar per hari. Meskipun kekuatan besar perekonomian Cina, terlalu sedikit kekayaan yang baru diperoleh telah mensirkulasi pada kaum miskin dan fakir.

Cina memiliki catatan busuk ketika berkaitan dengan penganiayaan agama. Perlakuannya atas semua agama tapi khususnya Kristen dan Islam adalah tidak kurang dari mengerikan. Meskipun usaha propaganda besar-besaran untuk meyakinkan dunia bahwa Cina menjadi jauh semakin terbuka dan bebas sejak Juni 1989 pembantaian Lapangan Tiananmen, penyiksaan agama semakin intensif. Para otoritas Cina telah mengintensifkan kampanye kekerasan mereka terhadap para penganut agama, termasuk Kristen Evangelis, Katolik Roma, para Muslim Uighur, Orang-orang Buddha Tibet, dan kelompok-kelompok lain seperti Falun Gong.

Kesimpulan

Kegagalan menyadari Negara Khilafah sebagai pilihan, meski resonansinya dengan ratusan juta Muslim tidaklah mengagetkan. Para pemimpin politik Barat lebih nyaman membandingkan cara hidup mereka dengan patokan rendahan para diktator brutal di Timur Tengah (meski merekalah yang memunculkan para pemimpin itu bertahun-tahun) daripada benar-benar mendiskusikan perkara-perkara substantif tentang sistem politik yang lebih baik bagi dunia Muslim. Model politik Islam adalah teruji dan terpercaya, ia menyeimbangkan insting material individu dengan nilai-nilai spiritual yang kuat, ia menjadikan akuntabilitas sebagai dogma-dogma kunci sistem politiknya dan mewajibkan setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, ia mendorong jasa politik tanpa melupakan bahwa kekayaan masyarakat terbesar adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinannya dan bahwa para politisi tanpa nilai-nilai adalah bagaikan kapal-kapal tanpa air. Aturan-aturan Syariah mengenai politik adalah tetap dan tidak bisa sebegitu mudah dimanipulasi. Syariah membangun budaya mengawasi dan meminta tanggung jawab penguasa oleh warga negara biasa, partai-partai politik, dewan-dewan terpilih dan oleh pengadilan itu sendiri. Ia menetapkan tidak ada orang yang di atas hukum dan tidak mengecualikan para politisi dari membayar kewajibannya atau dari penghukuman. Khalifah Bani Umayyah Umar bin Abdul Aziz (717-730) pernah mengatakan *"Rulers usually appoint people to watch over their subjects. I appoint you a watcher over me and my behaviour. If you find me at fault in word or action guide me and stop me from doing it"*.

"Para penguasa biasanya menunjuk orang-orang untuk memelihara urusan mereka. Aku menunjuk kalian sebagai pemelihara atas diriku dan perilakuku. Jika kalian menemukan bersalah dalam kata atau perbuatan tuntunlah diriku dan hentikan aku dari melakukannya". Ini adalah mekanisme akuntabilitas ter-institusionalisasi, tapi kesadaran akan Tuhan secara personal adalah yang memiliki kualitas hingga beliau akan mematikan lilin yang dibiayai dengan uang baitul mal bahkan ketika seseorang menyibukkannya dengan menanyakan tentang keadaan pribadinya. Kombinasi nilai-nilai dan aturan-aturan dalam Islam membuat suatu budaya politik di mana Khalifah pertama Sayidina Abu Bakar (ra) berkata: *"after my death hand over to Umar (his successor) this milk-camel and dish which were given to me on account of my Khilafah (Caliphate)."*

"setelah kematianku berikanlah pada Umar (penerusnya) unta-susu ini dan piring yang diberikan padaku atas nama Khilafah-ku." Itu tidak untuk diwariskan sebagai pemilikan pribadinya.

Ini bukanlah aspirasi dari banyak suporter dari para suporter demokrasi. Kebebasan dalam memilih pemimpin politik adalah keharusan, memiliki para pemimpin yang akuntabel adalah esensial, melindungi para minoritas berjalan tanpa disuruh, membuat para politisi melayani publik dan bukannya golongan elit adalah kritikal. Namun demokrasi sekular menurut sifat dasarnya bukanlah

kendaraan yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuan ini meski tangisan konstan untuk perubahan dari para politisi baru. Dalam prakteknya terdapat jurang yang lebar antara realitas negara-negara demokrasi dan retorikanya. Semakin dikendalikan oleh para elit kuat, terjangkau oleh korupsi dan ditunggangi oleh para politisi yang kepentingannya hanyalah kepentingan pribadinya sendiri, demokrasi sekular telah menjadi suatu sistem yang didesain untuk melindungi kaum berpengaruh dan orang-orang kaya. Utang meningkat seiring negara-negara demokratis terus membuat mabuk populasi-populasi mereka untuk pertimbangan-pertimbangan elektoral jangka-pendek. Krisis keuangan 2008 didorong oleh trinitas najis demokrasi, kapitalisme dan liberalisme membawa dunia menuju jurang bencana. Kita harus belajar dari pelajaran-pelajaran sebelum terlambat. Sebagaimana seorang Profesor Skotlandia abad 18 Alexander Tytler telah mengatakan:

Demokrasi tidak bisa eksis sebagai bentuk permanen pemerintahan. Ia hanya bisa eksis hingga para pemilih menemukan bahwa mereka bisa voting bagi diri mereka sendiri uang cuma-cuma dari kas publik. Sejak momen itu, mayoritas selalu voting untuk para kandidat yang menjanjikan keuntungan terbesar dari kas publik dengan hasil bahwa demokrasi selalu runtuh karena kebijakan fiskal longgar, selalu diikuti dengan suatu kediktatoran. Umur rata-rata peradaban terbesar dunia adalah 200 tahun.

Apa yang kita butuhkan hari ini adalah pemikiran segar, bukan model lain demokrasi sekular atau satu set reformasi lembek. Itu adalah sistem yang sangat bangkrut sehingga dunia membutuhkan pilihan baru radikal, bersenyawa dengan nilai-nilai baru dan etos baru politik melayani publik bukannya suatu elit kaya.

Ini adalah esensi pilihan Islam.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [Terjemah Makna Qur'an Surat (4) an-Nisa: 59]

Alhamdulillah.